

BUKU STATISTIK SEKTORAL **PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN**

Daerah Istimewa Yogyakarta
Covid-19 Dalam Data



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
Tahun 2021

BUKU STATISTIK SEKTORAL **PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN**

Daerah Istimewa Yogyakarta
Covid-19 Dalam Data



Kata Pengantar

Ketersediaan data dan informasi yang memadai, valid dan terkini telah diyakini menjadi salah satu kekuatan dalam pelaksanaan proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi dan pengendalian. Data dan informasi yang dapat diandalkan dan tepat waktu memberikan gambaran atas kondisi baik secara makro maupun detail per urusan atau lapangan usaha. Gambaran kondisi tersebut menjadi dasar bagi proses perencanaan untuk menentukan strategi, arah kebijakan dan mendesain program dan kegiatan untuk mengintervensi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mengatasi permasalahan daerah.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Data Statistik Sektor Perencanaan dan Pengendalian dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini dimaksudkan menyediakan data-data statistik sektoral yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka menyajikan informasi Covid-19 Dalam Data, data ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Disamping itu angka persebaran ini diharapkan dapat dijadikan kewaspadaan kita.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, April 2021
Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta

KEPALA



Drs. Beny Suharsono., M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

Daftar Isi

1	BAB I. PENDAHULUAN
1	A. Kondisi Umum Daerah
1	B. Luas dan Batas Wilayah
3	C. Letak dan Kondisi Geografis
4	D. Demografi
4	Kepadatan Penduduk
5	Penduduk Lansia
6	Rasio Jenis Kelamin
7	Laju Pertumbuhan Penduduk
19	BAB III. PENDIDIKAN
20	A. Pendidikan Menengah di DIY
	- Angka Partisipasi Kasar dan
22	Angka Partisipasi Murni
23	- Institusi Pendidikan Pesantren
24	B. Pendidikan Khusus
	C. Pendidik dan Tenaga
26	Kependidikan
	D. Penanganan Covid-19
27	Bidang Pendidikan
27	Angka Putus Sekolah
29	BAB IV. SOSIAL
30	A. Bantuan Sosial di DIY
	B. Penyandang Masalah
30	Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Potensi dan Sumber
32	Kesejahteraan Sosial (PSKS)
57	BAB VI. INFOGRAFIS
57	A. Kemiskinan
61	B. Ketimpangan

Halaman Judul	I
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar	VII

BAB II. SEKTOR KESEHATAN 9

A. Sarana Penunjang Kesehatan	10
B. Tenaga Kesehatan	10
C. Data Pasien Konfirmasi Covid-19	12
D. Kepesertaan Jaminan Sosial	18

BAB V. EKONOMI 33

A. Pariwisata	33
- Kunjungan Wisatawan	34
- Sarana Akomodasi Hotel	34
- Tingkat Hunian Hotel	35
- Pariwisata di DIY	35
B. Pertanian dan	
Ketahanan Pangan	38
- Penggunaan Lahan Pertanian	38
- Sub Sektor Hortikultura	40
- Sub Sektor Peternakan	45
C. Koperasi dan UMKM	47
D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	48
- Strategi Ketenagakerjaan	
Menghadapi Pandemi	49
- Angkatan Kerja	49
- Struktur lapangan Kerja	52
-Tingkat Pengangguran Terbuka	54

Daftar Tabel

1-1. Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis	3
1-2. Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY	3

2.1. Daftar Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Di Diy	10
2.2. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Diy	11
2.3. Sarana Kesehatan	12
2.4. Pasien Konfirmasi Covid-19 Per Kab Kota	13
2.5. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 Per Kecamatan Kab Bantul	14
2.6. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 Per Kecamatan Kab Gunungkidul	15
2.7. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 Per Kecamatan Kab Kulon Progo	15
2.8. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 Per Kecamatan Kab Sleman	16
2.9. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 Per Kecamatan Kota Yogyakarta	16
2.10. Data Pasien Terkonfirmasi Berdasar Jenis Kelamin	17
2.11. Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial	18

3.1. Distribusi Disinfectan Belanja Tidak Terduga	20
3.2. Distribusi Masker dan Faceshield Belanja Tidak Terduga	21
3.3. Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun Per Tahun 2020	21
3.4. Jumlah Siswa SMA, SMK dan MA di DIY Tahun 2020	21
3.5. Jumlah Satuan Pendidikan Menengah	22
3.6. Bantuan Perlengkapan dan Pembebasan Biaya Pendidikan	22
3.7. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah DIY 2020	23
3.8. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah DIY 2020	23
3.9. Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B berusia >15 tahun DIY 2020	24
3.10. Angka Putus Sekolah SM DIY 2020	24
3.11. Jumlah Pesantren dan Santri DIY Tahun 2020	25
3.12. Jumlah Satuan Pendidikan Khusus	25
3.13. Bantuan Perlengkapan Dasar dan Pembebasan Biaya Pendidikan	25
3.14. Siswa Disabilitas Sekolah Inklusi	26
3.15. Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapat Layanan di SLB	26
3.16. ABK DIY yang Belum Mendapat Layanan Pendidikan Khusus	27
3.17. Jumlah Guru Pendidik SMA, SMK dan SLB DIY Tahun 2020	27
3.18. Jumlah Sertifikasi Pendidik SMA, SMK dan SLB DIY Tahun 2020	28

Daftar Tabel

4.1. Jumlah Bantuan Penanganan Sosial	30
4.2. PMKS dan Sarana Kesejahteraan Sosial	30
4.3. Jumlah PMKS	31
4.4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	32

5.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk YIA	34
5.2. Jumlah Hotel	34
5.3. TPK Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta	35
5.4. Jenis Objek Wisata	35
5.5. Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang	36
5.6. Pariwisata DIY	37
5.7. Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan	38
5.8. Perubahan Penggunaan Sawah	39
5.9. Penggunaan Lahan (Land Use) Per Sektor	39
5.10. Lahan Pertanian	39
5.11. Lahan Hortikultura	41
5.12. Peternakan	45
5.13. Keragaan Koperasi DIY	47
5.14. Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota di DIY	48
5.15. Kondisi Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	48

Daftar Gambar

1.1	Peta Administratif DIY	2
1.2	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota	2
1.3	Sebaran penduduk di DIY menurut Kabupaten/Kota	5
1.4	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kelompok Umur	6
1.5	Peta Kepadatan Penduduk DIY	7
5.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja	49
5.2	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	50
5.3	Penduduk Bekerja Struktur Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019-2020	51
5.4	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan	52
5.5	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota	52
5.6	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	52
5.6	(Lanjutan) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	53
5.7	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Selama Sebulan Buruh/ Karyawan Menurut Kabupaten/Kota	53
5.8	Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Tahun 2020	54
5.9	Jumlah PHK dan Dirumahkan Tahun 2020	54
5.10	TPT Menurut Pendidikan DIY Agustus 2019 dan 2020	55
5.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional	55
5.12	TPT dan Jumlah Penganggur Kab/Kota	55
5.13	Target dan Capaian RPJMD (Tingkat Pengangguran Terbuka)	56



BAB I. PENDAHULUAN

B. Luas dan Batas Wilayah

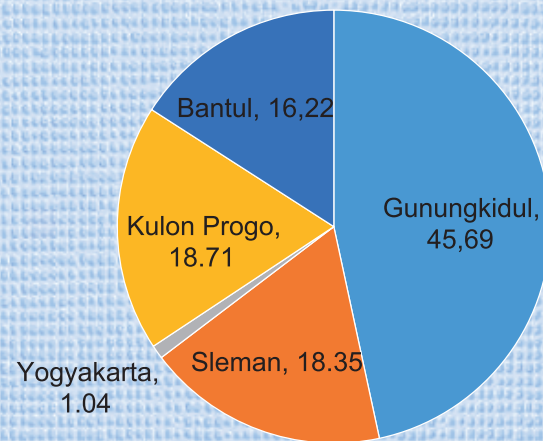
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah yang relative kecil dan berbatasan hanya dengan provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah DIY adalah **3.133,15** km² atau 0,16% dari total luas Indonesia (**1.916.906,77** km²). DIY merupakan daerah setingkat provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Secara pemerintahan, wilayah kabupaten/kota DIY dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulon Progo serta Kota Yogyakarta. Sementara struktur pemerintah di bawah kabupaten/kota meliputi 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan. Wilayah kabupaten/kota di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,04% yang secara lengkap perbandingan luasan antara wilayah disajikan pada gambar berikut ini.

A. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Secara astronomis, DIY terletak diantara 7o33'-8o12' Lintang Selatan dan 110o00'-110o50' Bujur Timur. Secara geografis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sementara sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudra Hindia.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020
Gambar 1-1 Peta Administrasi DIY



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020
Gambar 1-2 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Pesisir	Lembah /DAS	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran
Kulon Progo	Wates	12	88	10	-	22	66
Bantul	Bantul	17	75	5	-	13	62
Gunungkidul	Wonosari	18	144	18	2	55	87
Sleman	Sleman	17	86	-	-	15	71
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	-	-	45
DIY	Yogyakarta	78	438	33	0	105	331

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY_ DIY Dalam Angka 2019

Tabel 1.2. Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gununggandul Godeg Baron Layar Krokoh

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY_ DIY Dalam Angka 2019

C. Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut ini.

D. Demografi

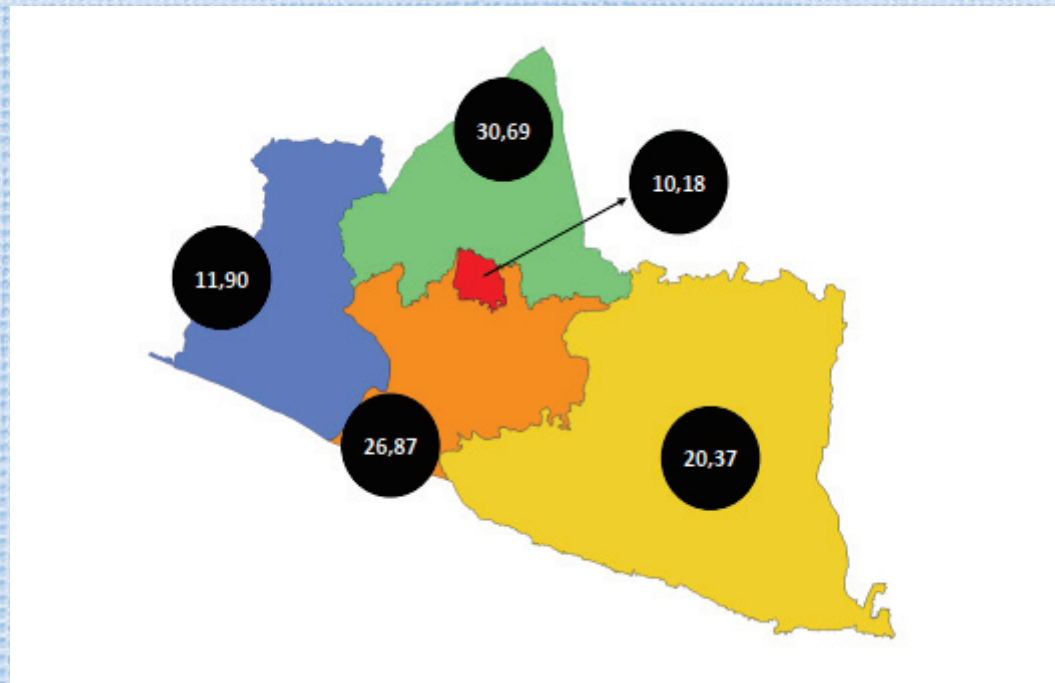
Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September 2020 sebanyak 3,67 juta orang. Dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya, jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk DIY mengalami penambahan sebanyak 211,23 ribu orang atau rata-rata 2,11 ribu orang setiap tahun. Secara keseluruhan, jumlah penduduk DIY telah bertambah sebanyak 1,44 juta orang sejak sensus penduduk pertama kali pada tahun 1961. Dalam

kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk di wilayah DIY sebesar 0,58 % per tahun. Angka tersebut menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46% jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 1,04%. Pertumbuhan periode 2010 - 2020 hampir sama dengan periode 1980 - 1990. Sejak pelaksanaan sensus penduduk 1961, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di DIY tercatat pada periode 1971 - 1980 yaitu sebesar 1,10 %. Keberhasilan program Keluarga Berencana atau KB pada periode 1980 - 2000 yang terkenal mengkampanyekan “2 anak saja cukup, laki-laki dan perempuan sama saja” telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi hanya di bawah 1 %.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 BPS adalah 1.151 jiwa/km² yang menurun tahun 2019 yaitu 1.206 jiwa/km². Terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara wilayah di DIY. Distribusi penduduk DIY relatif tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah ini. Meskipun demikian penduduk DIY relative terkonsentrasi di Kabupaten Sleman. Tiga puluh persen lebih penduduk DIY berada di Kabupaten Sleman. Selanjutnya Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di DIY. Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan

persentase penduduk yang paling sedikit di DIY. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 11,90 %. Sementara itu, Kota Yogyakarta mempunyai penduduk sebanyak 10,18 % dari total penduduk DIY. Sebaran penduduk di DIY menurut Kabupaten/Kota berdasarkan Sensus Penduduk 2020 BPS di tunjukkan pada gambar berikut ini:



Sumber : Sensus Penduduk 2020_Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
Gambar 1.3. Sebaran penduduk di DIY menurut Kabupaten/Kota (%)

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY berusia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun sekitar 16,76% dari seluruh penduduk dan usia 20-34 tahun sekitar 15,55%. Kondisi sumber daya manusia tersebut mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang produktif yang besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

Penduduk Lansia

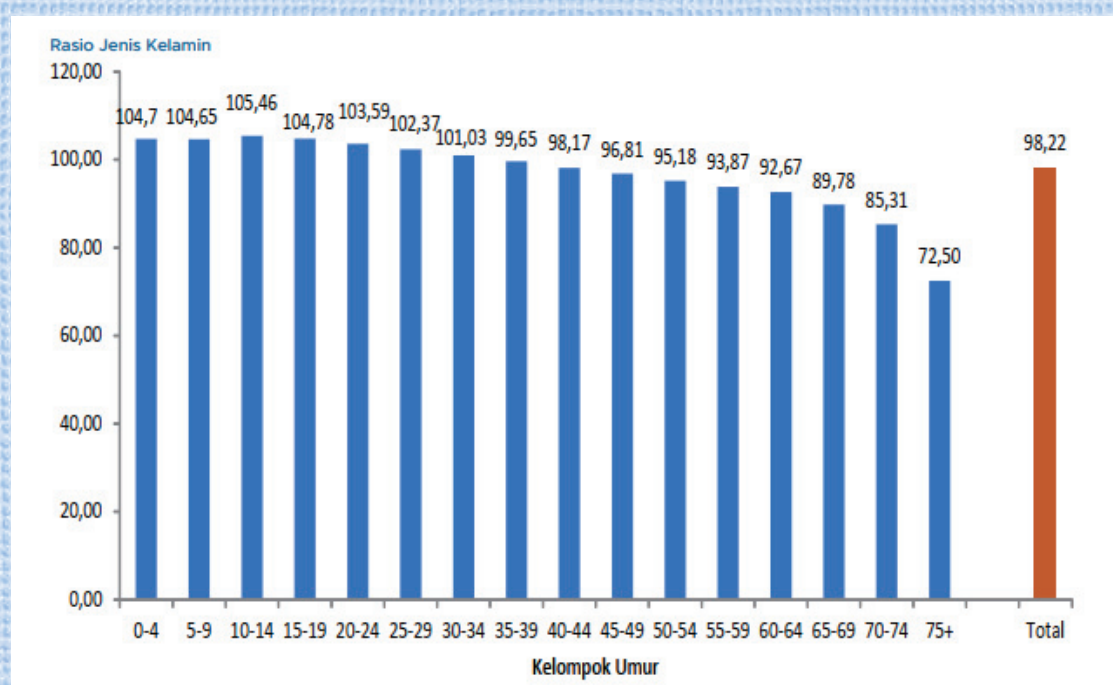
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki proporsi penduduk lanjut usia (lansia) paling tinggi di Indonesia, dengan 15,75%. Kemudian, diikuti dua provinsi lainnya di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, di kisaran 13%. Hal tersebut terjadi karena DIY merupakan Provinsi dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yang juga tertinggi di Indonesia. Presentase penduduk lansia DIY hasil Sensus Penduduk 2020 meningkat menjadi 15,75 % dari 13,08 % hasil Sensus Penduduk 2010. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa DIY berada pada era ageing population yaitu ketika presentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 % ke atas.

Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sensus Penduduk 2020) sebanyak 1,82 juta orang, atau 49,55 % dari penduduk DIY. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang atau 50,45 % dari penduduk, maka rasio jenis kelamin penduduk DIY sebesar 98,27.

Rasio jenis kelamin tersebut terlihat bervariasi menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin saat lahir mencerminkan pola dimana proporsi penduduk laki-laki lebih banyak

daripada perempuan. Pada kelompok usia 30-34 tahun, proporsi penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Selanjutnya, mulai kelompok umur 50 tahun ke atas proporsi penduduk laki-laki kembali mengalami penurunan yang disebabkan karena harapan hidup penduduk laki-laki lebih pendek dibandingkan penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin dan kelompok umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut:



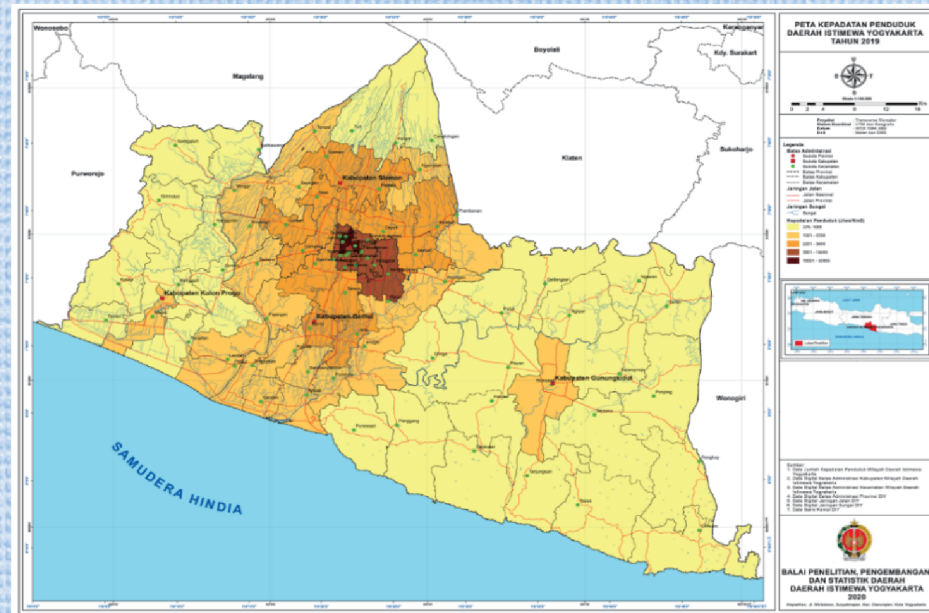
Sumber : Sensus Penduduk 2020_Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Gambar 1.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kelompok Umur

Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Dari data BPS Hasil Sensus Penduduk 2020), tercatat bahwa jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (September 2020 sebesar 3.668.719 Orang (selaras dengan data Diitjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan Desember 2020). Laju pertumbuhan penduduk per Tahun di DIY per

Tahun (2010 – 2020) sebesar 0,58 % (menurun dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,03 %). Presentase Penduduk Usia Produktif (15-64) sebesar 70,04 %, presentase Pnduduk Lansian 15,75 % naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 13,08 %. Sleman merupakan penduduk terbesar dengan konsentrasi 1,13 juta orang (30,59 % dari total penduduk DIY).



Sumber : Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2020
Gambar 1.5. Peta Kepadatan Penduduk DIY

Dinamika kependudukan dan proses pembangunan mempunyai keterkaitan timbal balik karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Salah satu data yang penting adalah data mengenai persebaran dan densitas atau

kepadatan penduduk yang sangat penting untuk diketahui. Data-data tersebut harus menjadi bagian integral dari perumusan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang efektif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB II

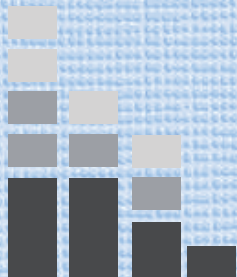
SEKTOR KESEHATAN



Kasus Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 28 April 2021 telah tercatat sebanyak 38.995 orang terkonfirmasi positif (sumber sistus resmi Covid-19 pemda DIY). DIY mencatat kasus pertama tanggal 15 Maret 2020. Sampai dengan 10 Juni 2020, dilaporkan sebanyak 250 orang telah terkonfirmasi positif. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya telah menetapkan masa tanggap darurat pada 20 Maret - 31 Mei 2020, namun mengingat perkembangan situasi, kebijakan tanggap darurat tersebut selanjutnya terus diperpanjang hingga saat ini.

Mengamati perkembangan penanganan Covid-19 di DIY, maka secara sederhana dapat dibagi dua fase yaitu fase emergensi dan fase perubahan. Fase emergensi difokuskan kepada pemenuhan sistem pelayanan kesehatan sementara fase perubahan kepada upaya pengendalian sosial terhadap risiko penularan dan pentahapan pengembalian fungsi sosial ekonomi.

DIY mencatat kasus pertama Covid-19 tanggal 15 Maret 2020. Angka kasus positif terus meningkat di setiap hari dan hingga tanggal 10 Juni 2020 orang telah terkonfirmasi positif di DIY. Dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY juga telah melaksanakan berbagai upaya melalui berbagai bidang ketugasan dalam struktur organisasinya. Kebijakan DIY melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah menetapkan masa tanggap darurat Covid-19 pada tanggal 20 Maret 2020 berakhir pada 31 Mei 2020. Namun demikian dengan melihat perkembangan pandemi, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro tersebut diperpanjang kembali, terakhir dari tanggal 20 April 2021 hingga 3 Mei 2021. Penerapan masa PPKM menetapkan berbagai kebijakan yang kental dengan berbagai kegiatan dalam rangka respon pelayanan kesehatan, surveilans, pembatasan sosial, informasi dan edukasi.



A. Sarana Penunjang Kesehatan

Berbagai kebijakan diambil oleh Pemda DIY untuk penanganan Covid-19 di DIY. Tanggal 17 Maret 2020, dibentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY melalui Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020. Kemudian disusul penetapan tanggap darurat di DIY pada tanggal 20 Maret 2020, melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY. Beberapa kebijakan lain dikeluarkan Pemda DIY seiring perkembangan kasus di DIY. Terakhir dalam rangka pengendalian Covid-19 dilingkungan kantor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran

Tabel 2.1. Daftar Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di DIY

No	Nama RS	Kab/Kota	Kapasitas Bed	
			Non Critical	Critical
1	RSUD Panembahan Senopati	Kab. Bantul	32	3
2	RSPAU Dr. S. Hardjolukito Kab Bantul	Kab. Bantul	60	3
3	RS Santa Elizabeth	Kab. Bantul	10	1
4	RS PKU Muhammadiyah Bantul	Kab. Bantul	51	2
5	RSUD Sleman	Kab. Sleman	21	2
6	RSUD Prambanan	Kab. Sleman	21	0
7	RS JIH	Kab. Sleman	19	1
8	RS Panti Rlni	Kab. Sleman	8	0
9	RSU Sakina Idaman	Kab. Sleman	8	0
10	RSJ Ghrasia	Kab. Sleman	10	0
11	RS PKU Muhammadiyah Gamping	Kab. Sleman	38	5

Covid-19 dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 19/SE/IV/2021 tentang Perpanjangan ketujuh Pelaksanaan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masa pandemi Covid-19 yang mulai berlaku tanggal 20 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021. Data-data terkait perkembangan dan penanganan Covid-19 di DIY akan di sajikan sebagai berikut:

No	Nama RS	Kab/Kota	Kapasitas Bed	
			Non Critical	Critical
12	RS Bayangkara POLDA DI	Kab. Sleman	27	0
13	RSA UGM	Kab. Sleman	65	5
14	RSU Hermina	Kab. Sleman	23	0
15	RS Islam Yogyakarta PDHI	Kab. Sleman	18	0
16	RSUP Dr. Sardjito	Kab. Sleman	112	28
17	RSUD Wonosari	Kab. Gunung Kidul	40	1
18	RSU Panti Rahayu	Kab. Gunung Kidul	4	0
19	RSUD WATES	Kab Kulon Progo	18	6
20	RSUD Nyi Ageng Serang	Kab Kulon Progo	12	1
21	RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	Kota Yogyakarta	30	10
22	RSUD Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	20	3
23	RSPanti Rapih	Kota Yogyakarta	49	3
24	RS Behtesda	Kota Yogyakarta	46	3
25	RS Siloam	Kota Yogyakarta	17	1
26	RS Pratama	Kota Yogyakarta	6	0
27	RS DKT Dr. Soetarto	Kota Yogyakarta	43	2

Sumber : Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta 2020

Ketersediaan sarana kesehatan yang memadai baik dalam jumlah maupun fasilitas tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 ini. Data terkait sarana kesehatan tersaji di bawah ini:

Tabel 2.2. Sarana Kesehatan

No	Sub Elemen	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	5.720	5.724	5.724	5.722
2	Jumlah Polindes	324	77	n/a	n/a
3	Jumlah Puskesmas				
3,1	Jumlah Puskesmas Induk	121	121	121	121
3,2	Jumlah Puskesmas Pembantu	321	310	319	319
3,3	Jumlah Puskesmas Keliling	137	134	191	191
3,4	Jumlah Poliklinik	282	225	225	225
4	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	80	80	80	80
4,1	Jumlah RSUD Tipe A	0	0	0	0
4,2	Jumlah RSUD Tipe B	4	4	4	4
4,3	Jumlah RSUD Tipe C	2	2	3	3
4,4	Jumlah RSUD Tipe D	2	2	1	1
5	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	590	420	430	440
5,1	(RSU) Swasta Tipe A	0	0	0	0
5,2	(RSU) Swasta Tipe B	7	4	4	4
5,3	(RSU) Swasta Tipe C	12	7	7	10
5,4	(RSU) Swasta Tipe D	28	31	30	30
5,5	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas	12	0	2	0
6	Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus	50	220	200	220

No	Sub Elemen	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
6,1	Jumlah RS Khusus Ibu dan Anak	n/a	12	10	12
6,2	Jumlah RS Khusus Mata	1	1	1	1
6,3	Jumlah RS Khusus Otak	n/a	0	0	0
6,4	Jumlah RS Khusus Gigi dan Mulut	1	2	2	2
6,5	Jumlah RS Khusus Kanker	n/a	0	0	0
6,6	Jumlah RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah	n/a	0	0	0
6,7	Jumlah RS Khusus Jiwa	2	2	2	2
6,8	Jumlah RS Khusus Infeksi	n/a	0	0	0
6,9	Jumlah RS Khusus Paru	1	1	1	1
6,1	Jumlah RS Khusus THT	n/a	0	0	0
6,11	Jumlah RS Khusus Bedah	n/a	4	4	4
6,12	Jumlah RS KO	n/a	0	0	0
6,13	Jumlah RS Khusus Ginjal	n/a	0	0	0
6,14	Jumlah RS Bersalin	n/a	0	0	0
6,15	Jumlah RS Kusta	n/a	0	0	0
7	Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1	1	1	1
8	Jumlah Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1
9	Klinik/Praktek Dokter	277	277	323	706
10	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	-	100	100	100

Sumber : Jogja Dataku, 2020

B. Tenaga Kesehatan

Selain sarana kesehatan yang mencukupi dalam menghadapi pandemi ini kecukupan dan ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting di perhatikan. DIY saat ini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. Hal ini mengingat kenaikan kasus yang terus terjadi dengan jumlah yang signifikan tiap harinya di DIY. Penambahan jumlah kasus baru tidak sebanding dengan jumlah SDM kesehatan di DIY. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan di DIY seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

C. Data Pasien Konfirmasi Covid-19

Pandemi covid-19 di DI Yogyakarta tak kunjung mereda sejak virus corona pertama kali merebak di Indonesia setahun lalu. Kendati demikian, tren penambahan kasus positif di wilayah DIY mulai dapat ditekan. Hal itu ditunjukkan dari jumlah kasus harian yang mengalami penurunan dibandingkan beberapa bulan lalu serta angka kesembuhan yang semakin meningkat. Meski demikian, masyarakat sebaiknya harus selalu waspada terhadap ancaman penularan yang masih sangat tinggi. Kesadaran penerapan protokol kesehatan menjadi kunci terhadap keberhasilan pendendalian pandemi ini. Kedisiplinan masyarakat yang dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah harus berjalan seiring sejalan

Tabel 2.3. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di DIY

Kab/Kota	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	KesMas	KesLing	Gizi	Lab Medik
Kulon Progo	232	35	805	331	82	48	48	62	97
Bantul	592	74	1.543	499	143	82	104	107	175
Gunung Kidul	250	41	799	373	65	58	40	58	83
Sleman	1809	210	3.534	710	321	82	122	196	361
Yogyakarta	805	108	2.374	369	273	69	53	88	235
D.I.Y	3688	468	9055	2282	884	339	367	511	951

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020

sehingga diharapkan pandemi segera dapat dikendalikan dan sendi-sendi kehidupan bisa mulai beradaptasi dalam tatanan normal baru.

Saat ini, setelah setahun lebih pandemi terjadi masyarakat seolah telah lalai dan sedikit abai dengan ancaman bahaya virus corona. Adanya program vaksinasi yang gencar dilaksanakan, himpitan ekonomi yang semakin memperberat kondisi kehidupan seolah menjadi pembenaran. Perlu kita semua waspada terhadap kemungkinan wabah gelombang kedua di DIY. Wabah gelombang kedua diperkirakan terjadi se usai Lebaran. Ini diperkirakan terjadi akibat masih banyaknya pemudik dari zona merah yang masuk ke DIY dan berkontak dengan warga. Hingga saat ini, gelombang mudik masih terjadi kendati pemda menetapkan pembatasan ketat angkutan mudik dan pengecekan/penyekatan di perbatasan.

Berdasarkan data dari Situs Resmi penanganan dan pengendalian Covid-19 di DIY (<https://corona.jogjaprov.go.id>) tersaji di bawah ini Tabel Pasien Konfirmasi Covid-19 berdasarkan statusnya per kab/kota. Data di peroleh tanggal 28 April pada pukul 15.30 WIB. Berdasar data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menduduki tempat teratas dalam kasus pasien terkonfirmasi yang dirawat. Selanjutnya diikuti Kabupaten Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut tidak mengherankan karena Kabupaten

Sleman dan Bantul memang memiliki jumlah penduduk yang besar serta mobilitas yang tinggi sehingga beresiko terhadap penyebaran cluster Covid-19. Yang perlu pula diwaspadai juga adalah Kota Yogyakarta sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan pemerintahan yang sangat potensial sebagai episentrum penularan yang massif. Oleh karena itu, data yang tersaji seharusnya menjadi alat kewaspadaan kita semua agar lebih patuh dalam mematuhi aturan dan protokol kesehatan secara konsisten utamanya saat beraktifitas dan berinteraksi dengan orang lain.

Tabel 2.4. Pasien Konfirmasi Covid-19 per Kab Kota

Pasien Konfirmasi per Kabupaten/Kota						
status	YOGYAKARTA	SLEMAN	BANTUL	KULON PROGO	GUNUNG KIDUL	NON DIY
dirawat	2.968	5.968	5.131	2.894	1.241	34
meninggal	148	156	151	27	57	
sembuh	2.962	6.331	4.726	1.004	1.068	33

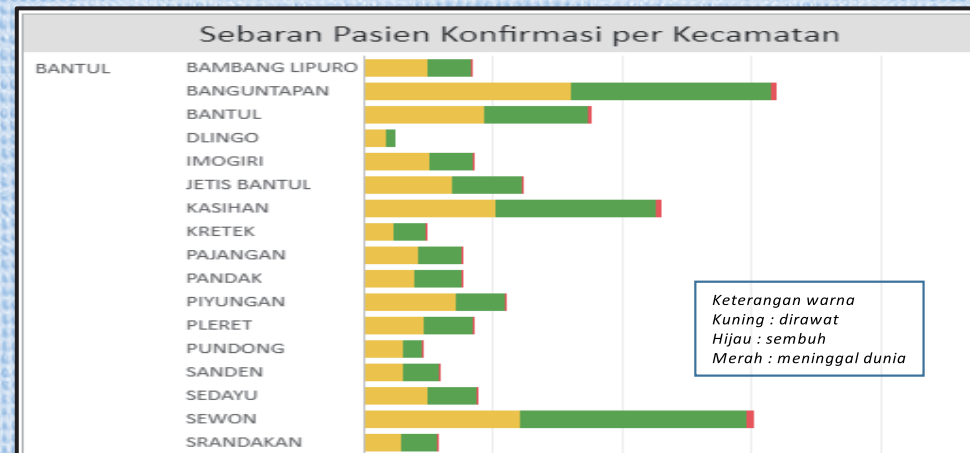
Sumber : <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>

Selanjutnya tersaji tabel Pasien Konfirmasi Covid-19 berdasarkan sebaran per kecamatan, per kabupaten. Data di peroleh tanggal 28 April pada pukul 15.30 WIB dari Situs Resmi penanganan dan pengendalian Covid-19 di DIY.

Data tersebut dapat menggambarkan peta kerawanan dan sebaran per kecamatan dalam satu kabupaten yang dapat dianalisis secara lebih mendalam penyebab dan cara mencegah penularan lebih lanjut. Misalnya, apakah di kecamatan tersebut merupakan ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan, apakah di kecamatan tersebut terdapat sentra-sentra perdagangan atau industry atau apakah di

kecamatan tersebut merupakan wilayah penduduk yang padat atau banyak terdapat pusat pendidikan. Faktor-faktor tersebut merupakan factor yang mendorong banyaknya aktifitas dan mobilitas penduduk sehingga interaksi dan resiko penularan menjadi tinggi. Hasil analisa tersebut akan berguna sebagai pertimbangan dan bahan perumusan kebijakan terkait penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Namun tentu saja, semua kebijakan pemerintah harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat agar dapat berhasil dan efektif.

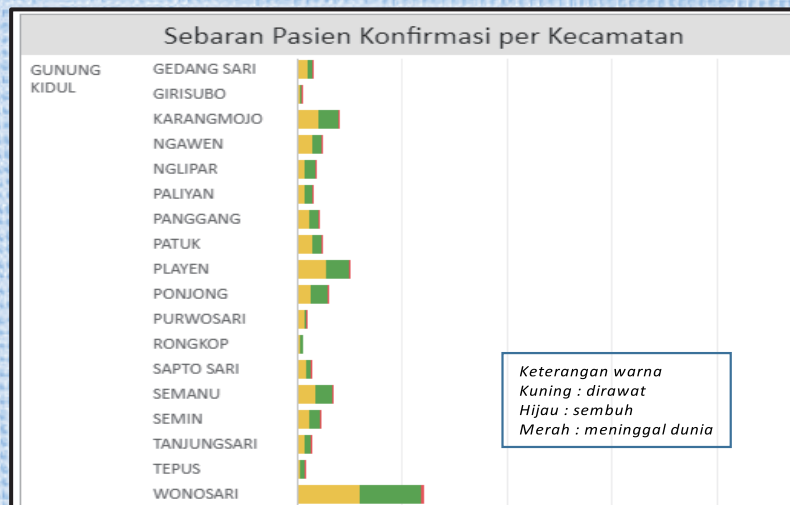
Tabel 2.5. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 per kecamatan Kab Bantul



Sumber : <https://corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik>
Data per tanggal 28 April 2021

Dari data tabel 2.5 terlihat bahwa di Kabupaten Bantul sebaran pasien terkonfirmasi Covid-19 terdapat di Kecamatan Banguntapan dan Sewon bukan di Kecamatan Bantul sebagai ibukota kabupaten. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat di 2 kecamatan tersebut yang sangat tinggi sehingga menyebabkan resiko penularan di 2 kecamatan tersebut menjadi sangat tinggi. Aktivitas dan mobilitas masyarakat tersebut terkait dengan aktivitas perekonomian dan perdagangan sehingga rentan terhadap interaksi antar individu yang berpotensi membawa resiko penularan yang besar.

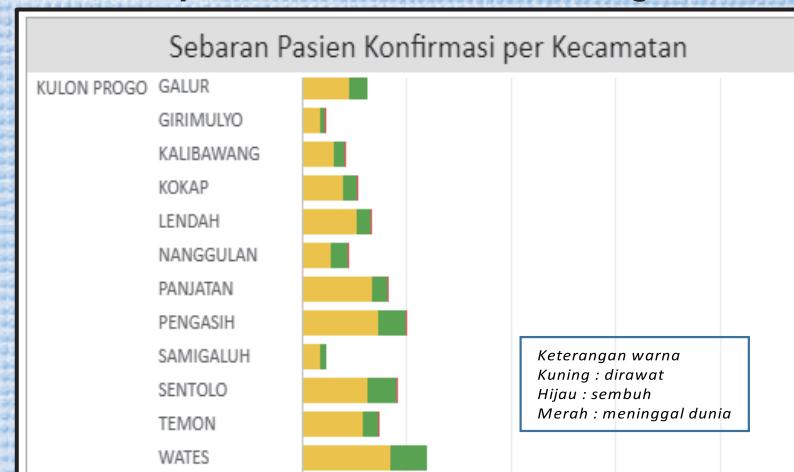
Tabel 2.6. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 per kecamatan Kab Gunungkidul



Sumber : <https://corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik>
Data per tanggal 8 April 2021

Dari data tabel 2.6 dan 2.7 terlihat bahwa kota Wonosari dan Kota Wates sebagai ibu kota kabupaten sekaligus pusat kegiatan masyarakat menjadi kecamatan yang tertinggi sebaran pasien terkonfirmasi di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Ini menunjukkan bahwa sebaran Covid-19 berjalan beri-iringan dengan laju tingginya aktivitas dan interaksi antar penduduk. Kota Wonosari sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan di Kabupaten Gunungkidul tentu saja membawa resiko interaksi antar individu dengan potensi penyebaran virus yang tinggi. Sedangkan Kota Wates sebagai ibukota kabupaten terlebih lagi adanya Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi gerbang keberangkatan dan kedatangan masyarakat dari berbagai penjuru menjadi resiko tersendiri yang harus sepenuhnya diantisipasi dan menjadi bahan kewaspadaan kita semua. Terbukti beberapa cluster penularan berasal dari migrasi penduduk dari dan ke Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.7. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 per kecamatan Kab Kulon Progo



Sumber : <https://corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik>
Data per tanggal 8 April 2021

Seperti halnya di Kabupaten Bantul, sebaran pasien konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Sleman tidak terjadi di ibukota kabupaten, namun terjadi di kecamatan yang paling padat serta tinggi aktifitas dan mobilitas masyarakatnya. Di Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang terpadat di Kabupaten Sleman serta terdapat sentra pendidikan dan pemukiman penduduk serta kost-kost yang relative padat. Konsisi seperti inilah yang menyebabkan Kecamatan Depok mempunyai prevalensi dan pasien terkonfirmasi positif yang lebih tinggi di bandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sleman. Dalam kasus seperti di Kabupaten Bantul dan Sleman, hasil analisis

berdasarkan kecamatan tersebut perlu di tindak lanjuti dengan kebijakan yang kongkrit serta dukungan berbagai pihak khususnya masyarakat. Adanya kebijakan PPKM dan PPKM Mikro tentunya salah satu tujuannya adalah memutus rantai penularan Covid-19 di masyarakat. Perlunya intervensi pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mensikapi faktor tersebut sehingga penanggulangan pandemi Covid-19 bisa berjalan beriringan dengan aktivitas masyarakat, utamanya aktivitas perekonomian.

Tabel 2.8. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 per kecamatan Kab Sleman



Sumber : <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>
Data per tanggal 8 April 2021

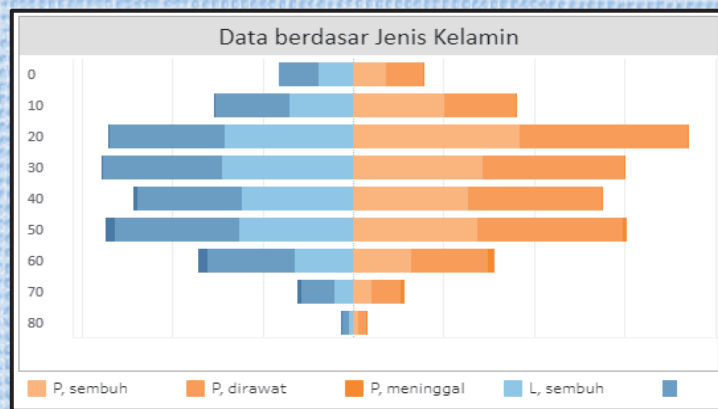
Tabel 2.9. Sebaran Pasien Konfirmasi Covid-19 per kecamatan Kota Yogyakarta



Sumber : <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>
Data per tanggal 8 April 2021

Kota Yogyakarta perlu mewaspadaai terhadap tingginya aktivitas perekonomian, perdagangan dan pariwisata. Penerapan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi sehingga dapat saling melindungi baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat luas.

Tabel 2.10. Data Pasien Terkonfirmasi Berdasar Jenis Kelamin



Sumber : <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>

D. Kepesertaan Jaminan Sosial

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia menyadarkan kita arti pentingnya Jaminan Kesehatan yang merata bagi semua masyarakat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang Undang tentang SJSN. Hal ini dimaksudkan agar semua penduduk terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan secara layak. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali berhak memperoleh layanan kesehatan dasar yang baik tanpa di pungut biaya karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam melindungi seluruh warga negaranya. Berikut data Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.11. Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah kepesertaan:					
1,1	BPJS	2.833.705	3.467.548	3.338.046	3.383.049	Orang
1.1.1	Kab Kulon Progo	315.421	374.015	408.134	405.358	Orang
1.1.2	Kab Bantul	758.131	954.815	830.669	838.108	Orang
1.1.3	Kab Gunungkidul	591.278	717.010	727.646	741.817	Orang
1.1.4	Kab Sleman	778.403	1.007.747	955.370	1.001.020	Orang
1.1.5	Kota Yogyakarta	390.472	413.961	416.227	396.746	Orang
1,2	Jamkesda Kab/Kota	205.863	-	-	-	Orang
1.2.1	Kab Kulon Progo	120.060	n/a	n/a	n/a	Orang
1.2.2	Kab Bantul	85.803	n/a	n/a	n/a	Orang
1.2.3	Kab Gunungkidul	0	n/a	n/a	n/a	Orang
1.2.4	Kab Sleman	0	n/a	n/a	n/a	Orang
1.2.5	Kota Yogyakarta	n/a	n/a	n/a	n/a	Orang

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke JKN-KIS. Kabupaten/ Kota di DIY telah turut serta mengintegrasikan program tersebut ke skema JKN-KIS. Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya keberhasilan Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).



BAB III

SEKTOR PENDIDIKAN

Akhir-akhir ini berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia tengah dikejutkan dengan wabah yang dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Wabah ini penularannya sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia sehingga World Health Organization (WHO) menyatakan wabah penyebaran virus Covid-19 sebagai pandemi dunia.

Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19

di Indonesia. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi Covid-19 ini, namun dibalik semua itu tentu terdapat pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran dalam menguasai teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia.

Kebijakan Pemda DIY dalam mensikapi situasi pandemi Covid-19 di sektor pendidikan salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur DIY nomor 421/8194. Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Penyebaran COVID-19 di Lingkungan DIY dinyatakan untuk:

1. Melanjutkan melaksanakan pembelajaran jarak jauh/online/belajar dari rumah pada satuan pendidikan jenjang TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MA di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan, serta mempertimbangkan peraturan dan kebijakan Kementerian terkait.

2. Program pembelajaran program paket A, paket B dan program paket C tetap dapat dilaksanakan selama masih memungkinkan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh/online sambil menunggu kebijakan program kesetaraan dari Pemerintah Pusat/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3. Menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk bekerjasama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas siswa tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/online sesuai dengan kewenangan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kewenangan Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar ada pada kewenangan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

A. Pendidikan Menengah di DIY

Ketersediaan lembaga pendidikan jenjang menengah di DIY mencakup 69 SMA Negeri dan 49 SMK Negeri yang seluruhnya telah terakreditasi, dengan memperhitungkan semua SMA dan SMK negeri dan swasta maka keseluruhan ketersediaan lembaga pendidikan menengah DIY untuk SMA ada sebanyak 169 SMA dan 219 SMK dengan jumlah total lembaga pendidikan menengah sebanyak 388 lembaga.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Dalam Rentang Pendidikan Menengah (Usia 16-18 tahun) Per Semester I Tahun 2020

No	Wilayah	Usia						Total
		16 tahun		17 tahun		18 tahun		
		L	P	L	P	L	P	
1	Sleman	8.204	7.699	7.898	7.392	7.886	7.623	46.702
2	Bantul	6.920	6.515	6.823	6.330	6.871	6.387	39.846
3	Gunungkidul	5.084	4.849	5.232	5.013	5.339	5.036	30.553
4	Yogyakarta	3.306	3.293	3.324	3.132	3.289	3.166	19.510
5	Kulon Progo	3.347	3.062	3.120	3.103	3.202	3.064	18.898
	Total	26.861	25.418	26.397	24.970	26.587	25.276	155.509

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2021
(kependudukan.jogjapro.go.id)

Pada Tabel 3.1 dapat diperhatikan dengan lebih detail jumlah keseluruhan penduduk DIY yang berusia 16-18 tahun sesuai dengan data yang tersedia dalam laman kependudukan.jogjapro.go.id per akhir tahun 2020 maka penduduk DIY usia 16-18 tahun ada sebanyak 155.509 penduduk, dengan perbandingan 51,34 % (79.845 penduduk) adalah laki-laki dan 48.66 % (75.664 penduduk) adalah perempuan.

Tabel 3.2. Jumlah Siswa SMA, SMK dan MA di DIY Tahun 2020

No	Wilayah	SMA		SMK		MA	
		L	P	L	P	L	P
1	Bantul	6.213	9.155	11.541	6.989	2.873	3.201
2	Sleman	6.646	7.896	12.221	9.775	2.458	3.793
3	Gunungkidul	2.468	3.997	10.650	8.103	749	1.177
4	Kulon Progo	2.034	2.957	5.237	3.947	627	991
5	Yogyakarta	6.960	9.590	10.166	7.006	1.376	1.398
	Total	24.321	33.595	49.815	35.820	8.083	10.560

Sumber: Dapodik dan Emis, 2020

Pada Tabel 3.2 di atas maka jumlah total siswa SMA, SMK, dan MA di DIY untuk tahun 2020 ada sebanyak 162.194 siswa tanpa memperhatikan pembatasan usia 16-18 tahun, dengan 50.69% (82.219 siswa) adalah siswa laki-laki sedangkan sisanya 49.31% (79.975 siswa) adalah siswa perempuan. Berdasarkan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan akses layanan pendidikan jenjang menengah di DIY tidak ada praktek diskriminasi dan tidak terjadi ketimpangan gender. Memperhatikan perimbangan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dengan jumlah siswa laki-laki dan perempuan maka yang terlihat adalah perimbangan yang sesuai dengan rasio penduduk dan rasio siswa berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.3. Jumlah Satuan Pendidikan Menengah

No	Wilayah	SMA		MA		SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bantul	19	17	4	13	13	35
2	Sleman	17	34	5	17	8	49
3	Gunungkidul	11	13	1	8	13	34
4	Kulon Progo	11	5	3	4	7	26
5	Kota Yogyakarta	11	29	2	4	8	21
	Total	69	98	15	46	49	165

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Dalam pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan maka pada jenjang pendidikan menengah ini terdapat 4.492 siswa SMA dan 8.908 siswa SMK berasal dari keluarga kurang mampu sehingga mendapatkan bantuan perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah. Pembebasan untuk biaya pendidikan telah dilakukan oleh Pemda DIY kepada 40.823 siswa SMA dan 47.858 siswa SMK di DIY. Detail dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Bantuan Perlengkapan dan Pembebasan Biaya Pendidikan

No	Wilayah	Bantuan Perlengkapan Dasar		Pembebasan Biaya Pendidikan	
		SMA	SMK	SMA	SMK
1	Yogyakarta	437	753	8.926	10.146
2	Sleman	829	2.082	9.249	9.779
3	Kulon Progo	498	1.321	4.559	5.813
4	Gunungkidul	1.113	3.187	5.480	10.414
5	Bantul	1.615	1.565	12.609	11.706
	Total	4.492	8.908	40.823	47.858

Sumber: Dapodik dan Emis, 2020

Pelaksanaan SPM dalam hal pemberian bantuan perlengkapan dasar bagi siswa miskin untuk tahun 2020 telah dilakukan sebesar 7.90% dari keseluruhan 56.831 siswa SMA dan 62% dari keseluruhan 76.652 siswa SMK, sedangkan untuk pembebasan biaya pendidikan di Tahun 2020 telah dilaksanakan mencapai 70,96% untuk SMA dan 62.43% untuk SMK.

Meskipun tidak mencapai 100% dapat dikatakan bahwa DIY mampu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK DIY rata-rata 66,70% sehingga dapat dikatakan bahwa DIY mampu untuk membebaskan lebih dari 50% siswa SMA dan SMK DIY dari biaya pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas Pendidikan yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Definisi dari Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Nilai APM menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Sedangkan definisi dari Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK tersebut menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Analisis terhadap APK dan APM digunakan dalam menentukan penduduk usia sekolah

dilakukan dengan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu serta menentukan penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut. Angka APK dan APM DIY diperhatikan pada tabel APK dan APM SM Tahun 2020/2021 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah DIY 2020

Wilayah	Penduduk k 16 -18	Murid Keseluruhan					APK (+Paket C)
		SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
Bantul	39.846	15.368	18.530	6.074	210	40.182	100,84
Sleman	46.702	14.542	21.996	6.251	236	43.025	92,13
Gunungkidul	30.553	6.465	18.753	1.926	67	27.211	89,06
Kulon Progo	18.898	4.991	9.184	1.618	23	15.816	83,69
Yogyakarta	19.510	16.550	17.172	2.774	480	36.976	189,52
DIY	155.509	57.916	85.635	18.643	1.016	163.210	104,95

Sumber: Data Dikpora 2020 (LPPD 2020)

Tabel 3.6. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah DIY 2020

Wilayah	Penduduk k 16 -18	Murid Keseluruhan					APK (+Paket C)
		SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
Bantul	39.846	11.296	14.047	4.546	29	29.918	75,08
Sleman	46.702	11.357	17.907	4.198	104	33.566	71,87
Gunungkidul	30.553	5.433	15.579	1.587	69	22.668	74,19
Kulon Progo	18.898	3.928	7.173	1.302	9	12.412	65,68
Yogyakarta	19.510	12.622	14.459	1.948	64	29.093	149,12
DIY	155.509	44.636	69.165	13.581	275	127.657	82,09

Sumber: Data Dikpora 2020 (LPPD 2020)

Membandingkan APK dengan APM maka selisih untuk penduduk usia 16-18 tahun dengan penduduk DIY usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan menengah di DIY maka ada selisih 27.852 siswa dengan asumsi siswa tersebut berada dalam usia dibawah 16 tahun maupun diatas 18 tahun, serta tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga berasal dari luar DIY.

Tabel 3.7. Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B berusia >15 tahun DIY 2020

Wilayah	SMP	MTs	Paket B	Jumlah
	>15 thn	>15 thn	>15 thn	
Bantul	926	229	641	1.796
Sleman	589	122	581	1.292
Gunungkidul	1.415	193	219	1.827
Kulon Progo	538	430	25	993
Yogyakarta	543	45	424	1.012
Jumlah	4.011	1.019	1.890	6.920

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Sesuai data diatas maka dapat asumsikan bahwa masih ada penduduk DIY dalam rentang usia 16-18 tahun yang masih menempuh pendidikan di tingkat pendidikan dasar yaitu pendidikan menengah pertama sebanyak 6.920 siswa.

Institusi Pendidikan Pesantren

Selain jenjang SMA/SMK terdapat pula Pesantren sebagai institusi pendidikan formal. Tabel dibawah ini menunjukkan data terkait pesantren dan jumlah santri baik yang bermukim maupun tidak bermukim.

Tabel 3.8. Jumlah Pesantren dan Santri DIY Tahun 2020

Kabupaten	Pesantren	Tipe Pesantren		Jumlah Santri	
		Satuan Pendidikan	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	Mukim	Tidak Mukim
Kulon Progo	59	26	33	3.057	4.159
Bantul	89	36	53	9.365	2.388
Gunungkidul	33	8	25	3.414	1.140
Sleman	103	58	45	13.509	6.267
Yogyakarta	35	21	14	5.866	317
	319	149	170	35.211	14.271

Sumber: Data PDPP Kemenag 2019 <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>

Memperhatikan jumlah keseluruhan santri yang menempuh pendidikan pesantren di DIY maka ada 49.482 santri. Kondisi ekonomi yang menyebabkan penduduk DIY usia 16-18 tahun yang memutuskan untuk menjadi tenaga pencari kerja. Sehingga ada kemungkinan besar angka 23.479 penduduk DIY usia 16-18 tahun tersebut menjadi bagian dari penduduk yang bekerja sesuai dengan golongan usia 15-19 tahun berdasar pada data Ketenagakerjaan Sakernas per Agustus tahun 2020 ada sebanyak 66.213 orang. Dengan asumsi berdasar pada data yang sudah disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 23.479 penduduk DIY usia 16-18 tahun yang belum mendapat akses atau layanan pendidikan menengah adalah penduduk DIY yang kemungkinan besar adalah menjadi bagian dari 49.482 santri di pesantren DIY maupun bagian 66.213 angkatan kerja DIY golongan usia 15-19 tahun.

B. Pendidikan Khusus

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat. Meskipun demikian, ketersediaan lembaga pendidikan khusus juga sangat diperhatikan. Ketersediaan lembaga pendidikan khusus DIY ada 79 SLB, dengan 9 SLB Negeri dan 70 SLB Swasta. Pendidikan khusus memotret penduduk DIY usia 4–18 tahun yang menyandang disabilitas. Terhadap capaian layanan pendidikan khusus DIY maka jumlah penduduk DIY menyandang disabilitas menurut data yang diambil dari jogjapro.go.id (Per Semester II 2020) maka ada sebanyak 8.333 penduduk. Data ini tidak terbagi per usia, data yang ada dan tersedia di jogjapro.go.id merupakan jumlah penduduk DIY penyandang disabilitas di segala usia.

Untuk data penduduk DIY usia 4-18 tahun yang mendapatkan akses pendidikan khusus maka data diperoleh melalui data Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY sebagaimana berikut, dengan catatan bahwa layanan pendidikan khusus dalam kondisi sebenarnya tidak menerapkan pembatasan usia yang diperbolehkan untuk menempuh dan mendapatkan akses layanan pendidikan khusus itu sendiri:

Tabel 3.9. Jumlah Satuan Pendidikan Khusus

Kabupaten /Kota	Sekolah		
	Negeri	Swasta	Total
Bantul	2	18	20
Sleman	1	28	29
Gunungkidul	2	11	13
Kulon Progo	1	7	8
Yogyakarta	3	6	9
DIY	9	70	79

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2020 sudah memberikan bantuan perlengkapan dasar kepada 90 Siswa meskipun angka tersebut masih kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah siswa ABK DIY sehingga hal ini dapat menjadi perhatian untuk terus meningkatkan jumlah siswa miskin yang dapat menerima bantuan perlengkapan dasar.

Tabel 3.10. Bantuan Perlengkapan Dasar dan Pembebasan Biaya Pendidikan

Kabupaten /Kota	Jumlah Siswa ABK Penerima Bantuan Perlengkapan Dasar	Jumlah Siswa ABK Penerimaan Pembebasan Pembiayaan Pendidikan		
		L	P	Jml
Bantul	23	247	169	416
Sleman	15	83	42	125
Gunungkidul	17	152	88	240
Kulon Progo	-	128	71	199
Yogyakarta	35	256	181	437
DIY	90	866	551	1.417

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Untuk pembebasan biaya pendidikan khusus sendiri, maka bantuan yang telah diberikan mencapai 20.68% dari total jumlah siswa ABK di tahun 2020. Selain pada sekolah khusus, siswa disabilitas juga sudah banyak yang bersekolah di sekolah-sekolah inklusi di DIY. Jumlah siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11. Siswa Disabilitas Sekolah Inklusi

No	Kab/Kota	SD Inklusi		SMP Inklusi		SMA Inklusi		SMK Inklusi	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bantul	360	156	93	25	17	13	10	7
2	Gunungkidul	131	53	77	29	8	1	8	1
3	Kulon Progo	101	36	11	6	3	4	1	2
4	Sleman	142	53	11	2	19	12	6	2
5	Yogyakarta	144	84	7	5	45	60	42	56
	Jumlah total	878	382	199	67	92	90	67	68

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Tabel 3.12. Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapat Layanan di SLB

No	Kab/Kota	TKLB		SDLB		SMPLB		SMALB	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bantul	21	15	451	262	228	169	214	142
2	Gunungkidul	4	4	324	207	138	91	50	58
3	Kulon Progo	11	4	132	109	102	51	36	34
4	Sleman	30	16	520	302	231	167	175	126
5	Yogyakarta	15	8	162	108	106	62	71	51
	Jumlah	81	47	1.589	988	805	540	546	411

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Sesuai dengan data diatas maka jumlah peserta didik layanan pendidikan khusus DIY baik yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi ada sebanyak 6.850 siswa. Memperhatikan jumlah penduduk DIY penyandang disabilitas sebanyak 8.333 orang dengan jumlah peserta didik layanan pendidikan khusus sebanyak 6.850 siswa. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY masih ada 983 penduduk DIY usia 4-18 tahun yang belum mendapatkan akses layanan pendidikan khusus.

Tabel 3.13. ABK DIY yang Belum Mendapat Layanan Pendidikan Khusus

No	Kabupaten/Kota	ABK tidak bersekolah usia		
		SD	SMP	SMA
1	Kab. Bantul	116	98	106
2	Kab. Gunungkidul	56	56	74
3	Kab. Kulon Progo	87	41	80
4	Kab. Sleman	71	66	72
5	Kota Yogyakarta	22	13	25
	Jumlah	352	274	357

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Khusus di tahun 2020 sudah mencapai 87.45%. Layanan Pendidikan Khusus DIY belum dapat mencapai 100% namun demikian APK 87,45% adalah capaian yang luar biasa, dimana setiap tahun angka ABK yang belum mendapatkan akses layanan pendidikan khusus semakin berkurang. Apabila melihat angka ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan khusus di tahun 2020 maka masih ada 983 ABK usia SD, SMP dan SMA yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Khusus. Sosialisasi, advokasi dan pendampingan yang

telah dilakukan Dinas Dikpora DIY melalui Bidang Pendidikan Khusus secara signifikan mampu mengurangi angka ABK yang belum mendapatkan akses layanan pendidikan khusus, sedangkan alasan klasik yang masih ada terkait dengan ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan khusus masih seputar alasan seperti adanya permasalahan ekonomi, malu/minder dengan disabilitas yang dimiliki, jarak rumah dengan sekolah yang jauh dan tidak ada yang mengantar, jenis disabilitas yang berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanan dan akses pendidikan khusus, dan juga terkait dengan kurangnya kesadaran orang tua/keluarga akan pentingnya sekolah bagi anak-anak mereka yang menyandang disabilitas.

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan baik secara jumlah kebutuhan maupun peningkatan mutu dan kualitas dari pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pilar pokok atas mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri, dengan berpegangan pada semangat ini maka pada bagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan dibahas permasalahan atau persoalan sekitaran pemenuhan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan DIY.

Tabel 3.14. Jumlah Guru Pendidik SMA, SMK dan SLB DIY Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Pendidik Jenjang SMA		Pendidik Jenjang SMK	
		Jumlah Pendidik	Sertifikasi Pendidik	Jumlah Pendidik	Sertifikasi Pendidik
1	Bantul	1.076	736	1.534	876
2	Sleman	1.166	636	1.734	943
3	Gunungkidul	551	369	1.274	744
4	Kulon Progo	422	312	808	465
5	Kota Yogyakarta	1.249	734	1.323	837
	DIY	4.464	2.787	6.673	3.865

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Tabel 3.15. Jumlah Sertifikasi Pendidik SMA, SMK dan SLB DIY Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Pendidik Jenjang SLB	
		Jumlah Pendidik	Sertifikasi Pendidik
1	Yogyakarta	178	144
2	Sleman	372	134
3	Kulon Progo	106	102
4	Gunungkidul	153	129
5	Bantul	330	152
	DIY	1.139	661

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Dari data di atas, dapat dijadikan sebagai pendorong untuk tetap meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan DIY melalui pemenuhan kebutuhan baik personal maupun kualitas dari pendidik itu sendiri. Jenjang SMA dan SMK dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata sebesar 59,73% dari pendidik SMA dan SMK termasuk dalam pendidik layak mengajar. Sedangkan untuk SLB, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 1.139 pendidik jenjang SLB dimana dari jumlah tersebut sebanyak 661 orang memiliki latar belakang Pendidikan

S-1/D-4 dan memiliki sertifikat pendidik. Untuk jenjang SLB pemenuhan minimal kebutuhan guru belum dapat dipenuhi dan 58,03% dari jumlah pendidik jenjang SLB yang dapat dikatakan layak mengajar. Meski demikian upaya dan usaha untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas serta pemenuhan jumlah kebutuhan minimal guru menjadi point penting bagi Dinas Dikpora DIY sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dan kelayakan akses layanan Pendidikan khusus.

D. Penanganan Covid-19 Bidang Pendidikan (dengan sumber dana BTT)

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini Pemda DIY khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada prinsipnya masih menerapkan sistem belajar dari rumah (BDR). Selain itu, jenjang SD hingga SMA/SMK diperkenankan melakukan konsultasi materi pelajaran secara terbatas di sekolah. Baik Pemda maupun Dinas berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penanganan dan pengendalian pandemi khususnya di lingkup sekolah. Deskripsi pelaksanaan program/kegiatan khusus penanganan Covid-19 bidang pendidikan diketahui dari capaian pelaksanaan Rencana Operasi yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bidang Pendidikan. Capaian kinerja fisik pelaksanaan semua program/kegiatan penanganan Covid-19 yang dibayai Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai 100%. Setidaknya kegiatan yang dilaksanakan, meliputi sterilisasi/penyemprotan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan aplikasi verifikasi berkas PPDB secara daring/online, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitasi pendukung protokol kesehatan pada

sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan dan dukungan protokol kesehatan bagi sekolah. Secara rinci capaian fisik kegiatan penanganan Covid-19 bidang pendidikan yang pada Rencana Operasi (Renops) terurai sebagai berikut :

Tabel 3.16. Distribusi Disinfectan Belanja Tidak Terduga

Distribusi	Yogyakarta	Bantul	Kulon Progo	Sleman	GK	DIY
SMA/SMK/SLB *)	160	206	118	268	166	
Balai Dikmen	15	15	15	15	15	
Dikpora						6
Jumlah	175	221	133	283	181	6

* Keterangan : setiap sekolah menerima 2 jerigen @ 5 liter
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY, 2021

Tabel 3.17 Distribusi Masker dan Faceshield Belanja Tidak Terduga

Distribusi	Yogyakarta		Bantul		Kulon Progo		Sleman		Gunung kidul		DIY	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. SMA/SMK/SLB	400	3.200	515	4.120	295	2.360	670	5.360	410	3.280	-	-
2. Dinas Dikpora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	40

Keterangan : M=masker dan F=Faceshield
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY, 2021

Angka Putus Sekolah (APS)

Pandemi Covid-19 ini tentu saja sangat mempengaruhi dunia pendidikan secara keseluruhan karena berubahnya KBM dari pertemuan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Konsekuensi terhadap diberlakukannya pembelajaran jarak jauh adalah biaya ekstra yang harus dikeluarkan para orang tua siswa untuk membeli perangkat smartphone atau laptop dan

koneksi internet dengan kuota yang cukup besar. Hal tersebut mulai membawa dampak terhadap keberlangsungan pendidikan di DIY utamanya yang terkait dengan putus sekolah.

Tabel 3.18 Angka Putus Sekolah SM DIY 2020

No	Kabupaten/ Kota	SMA			MA			SMK			Total
		Putus Sekolah									
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	3	2	5	5	6	11	7	4	11	27
2	Sleman	0	4	4	0	0	0	10	9	19	13
3	Gunungkidul	2	0	2	0	1	1	20	4	24	27
4	Kulon Progo	1	2	3	1	0	1	6	10	16	20
5	Yogyakarta	0	0	0	1	1	2	11	4	15	17
	Jumlah	6	8	14	7	8	15	54	31	85	104

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Upaya dan kebijakan baik dari Dinas maupun pihak sekolah dalam mensikapi putus sekolah sebagai dampak Pembelajaran Jarak Jauh sudah diterapkan, semisal bagi siswa yang tidak mampu melakukan pembelajaran secara daring tetap dimungkinkan melakukan pembelajaran luar jaringan seperti mengambil materi pembelajaran di sekolah untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan kembali ke sekolah.

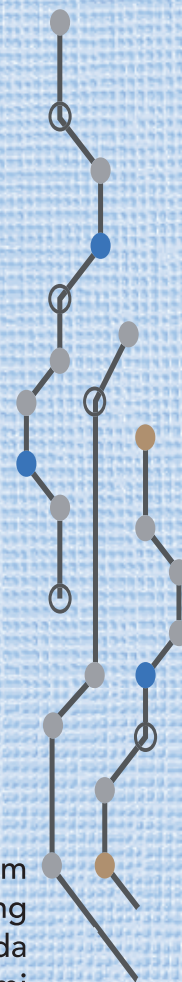
BAB IV

SEKTOR SOSIAL

Pandemi Covid-19 merupakan persoalan kompleks yang berpengaruh terhadap berbagai lini sektor, salah satunya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%, dan ini berlaku hampir di semua lapangan usaha. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sehingga, dalam menangani krisis tersebut pemerintah menerapkan Program Bantuan Sosial dengan tujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi

saat krisis.

Jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi, program Bantuan Sosial telah menjadi komponen penting dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998. Kala itu, krisis ekonomi mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 39,1% atau 79,4 juta jiwa dari seluruh penduduk. Program Bantuan Sosial hadir sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mikro pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi.



A. Bantuan Sosial di DIY

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY optimis bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan sebagai bagian dari penanganan Covid-19 di DIY telah tepat sasaran. sampai saat ini, Pemda DIY telah mengeluarkan dana sekitar Rp 273,9 miliar dari sekitar Rp 600 miliar yang telah disediakan. Dari dana tersebut, pengeluaran terbanyak ialah untuk Sosial Kemasyarakatan, termasuk bansos. Data terkait jumlah bantuan penanganan Covid-19 yang diperoleh dari Dinas Sosial DIY tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Bantuan Penanganan Sosial

No	Jenis Bantuan	Jumlah (KK/Orang)
1	Bantuan Uang Tunai (Top Up) Tahap 1	169.383 (KK)
2	Bantuan Uang Tunai Tahap II	3.987 (KK)
3	Bantuan Beras	33.000 (KK)
4	Bantuan Lanjut Usia	2.250 (orang)
5	Bantuan Penyandang Disabilitas	750 (orang)
6	Bantuan Mahasiswa	1.129 (orang)
7	Bantuan Bekas Warga Binaan LP	226 (orang)

Sumber: Data Dinas Sosial DIY 2021

B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Salah satu fokus dalam penanganan masalah sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Istilah PMKS saat ini telah di rubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Secara istilah, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,

kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosialnya secara memadai dan wajar. Data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdapat dalam aplikasi Dataku tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 PMKS dan Sarana Kesejahteraan Sosial

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	484.064	660.627	637.457	637.457	Orang
1,1	Anak Jalanan	348	67	72	72	Orang
1,2	Eks Psikotik	1.742	1.654	1.375	1.375	Orang
1,3	Pengemis	170	134	147	147	Orang
1,4	Gelandangan	236	190	197	197	Orang
1,5	Anak Balita Terlantar	1.309	762	620	620	Orang
1,6	Anak Terlantar	13.960	11.009	9.607	9.607	Orang
1,7	Korban Tindak kekerasan	829	762	697	697	Orang
1,8	Pemulung	511	467	465	465	Orang
1,9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.405	12.454	12.365	12.365	Orang
1,1	Lanjut Usia Terlantar	45.765	42.417	37.442	37.442	Orang
1,11	Penyandang Disabilitas	29.530	29.025	27.129	27.129	Orang
1.11.1	Penyandang Tuna Netra	2.207	2.015	1.728	1.728	Orang
1.11.2	Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data gabungan tuna wicara,rungru-wicara)	2.214	1.996	1.689	1.689	Orang
1.11.3	Penyandang Tuna Daksa	8.811	8.761	6.488	6.488	Orang
1.11.4	Penyandang Tuna Grahita	7.980	7.153	6.099	6.099	Orang
1.11.5	Penyandang Disabilitas Mental	1.742	1.635	1.357	1.357	Orang

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1.11.6	Penyandang Disabilitas Ganda	1.719	1.390	1.113	1.113	Orang
1.11.7	Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	185	301	185	185	Orang
1.12	Tuna Susila	406	290	259	259	Orang
1.13	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	170	247	225	225	Orang
1.14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	500	466	439	439	Orang
1.15	Keluarga Fakir Miskin	367.540	550.868	534.994	534.994	KK
1.16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.943	4.960	4.979	4.979	KK
1.17	Korban Bencana Alam	433	61	8	8	Orang
1.18	Korban Bencana Sosial	29	0	117	117	Orang
1.19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	361	303	327	327	Orang
1.2	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.104	3.712	4.193	4.193	Orang
2	Jumlah Panti Sosial (Balai Perlindungan & Rehabilitasi Sosial)	6	6	6	6	
2.1	Panti Sosial Asuhan Anak (Balai Rehabilitasi Sosial & Pengasuhan Anak)	2	2	2	2	Unit
2.2	Panti Sosial Tresna Wredha (Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha)	2	2	2	2	Unit
2.3	Panti Sosial Bina Remaja (Balai Perlindungan & Rehabilitasi Sosial Remaja)	1	1	1	1	Unit
2.4	Panti Sosial Karya Wanita (Balai Perlindungan & Rehabilitasi Sosial Wanita)	1	1	1	1	Unit
2.5	Panti Sosial Bina Karya (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya & Laras)	1	1	1	1	Unit

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
2.6	Balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas	1	1	1	1	Unit
3	Jumlah Panti Sosial	121	130	133	133	Unit
3.1	Kabupaten Kulon Progo	24	25	25	25	Unit
3.2	Kabupaten Bantul	27	27	27	27	Unit
3.3	Kabupaten Gunungkidul	17	17	18	18	Unit
3.4	Kabupaten Sleman	41	46	47	47	Unit
3.5	Kota Yogyakarta	12	15	16	16	Unit
4	Pusat Rehabilitasi Narkoba	5	5	5	5	Unit
5	Rumah singgah	8	8	9	9	Unit
6	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	n/a	301	823	823	KK

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Sedangkan data elemen Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik jumlah, yang seharusnya menerima bantuan dan jumlah yang telah diberikan bantuan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Jumlah PMKS

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah PMKS	484.064	660.627	637.457	637.457	Orang
2	PMKS Yang Tertangani	20	14	14	18	Jenis
3	PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	484.064	660.627	637.457	637.457	Orang
4	PMKS Yang Diberikan Bantuan	15.013	19.087	155.236	155.236	Orang

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Mempertimbangkan situasi saat ini dengan adanya pandemi Virus Corona-2019 maka terjadi kenaikan jumlah penduduk yang bekerja golongan usia 15-19 tahun pada data per Agustus pada 2 tahun terakhir. Pandemi Virus Corona-2019 yang terjadi pada hitungan awal tahun 2019 maka sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 ini maka terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang bekerja, di tahun 2018 (data per agustus) tercatat ada 56.114 meningkat menjadi 63.381 di tahun 2019 (data per Agustus) dan masih terus meningkat di tahun 2020 (data per Agustus) sebanyak 66.213 orang. Peningkatan jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang bekerja dalam waktu 2 tahun terakhir mencapai 10.099 penduduk. Terkait kondisi sosial menggunakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019 maka terdapat data yang terkait dengan anak meskipun golongan usia yang digunakan adalah 5-18 tahun/6-18 tahun tidak spesifik dalam penggolongan 16-18 tahun, yaitu data anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 55 anak dan data anak jalanan sebanyak 72 anak.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sedangkan yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Data terkait Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari 6 unsur tersaji seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Karang Taruna	438	438	438	438	Kelompok
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	78	78	78	78	Orang
3	Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	372	381	381	387	Unit
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	4.960	5.020	5.130	5.130	Orang
5	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1.058	1.030	1.068	1.068	Orang
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	193	223	263	263	Kelompok

Sumber : Jogja Dataku, 2020

A. Pariwisata

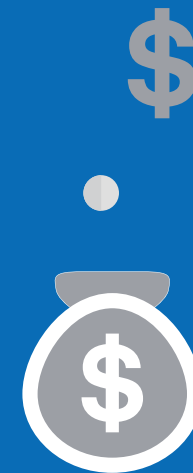
Sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi Covid-19. Hampir di seluruh wilayah tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis, tak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta.

Memasuki periode masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Terdapat tim verifikasi dan bidang penegakan hukum yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesiapan perangkat-perangkat pendukung khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

Mengawali tahun 2021 pandemi masih menjadi kondisi umum yang memerlukan adaptasi di semua sektor kehidupan masyarakat. Pemberlakuan pengetatan secara terbatas di sektor pariwisata DIY berdasarkan SE Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 188/00493 yang merupakan respon dari Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 Tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY. Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 11-25 Januari 2021.



Masyarakat dan sektor Pariwisata Yogyakarta menjadi bagian dari setiap upaya penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian adaptasi harus terus dilaksanakan mengikuti perkembangan situasi dan kebijakan yang ada. Kegiatan sektor pariwisata tidak berhenti total tetapi dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang mendukung upaya pengendalian pandemi Covid-19. Bagi masyarakat umum dan wisatawan perlu mencermati berbagai penyesuaian dalam pelayanan pariwisata. Walaupun tidak diberlakukan jam malam, tetapi diberlakukan pembatasan untuk jumlah pengunjung dan jam operasional.



BAB V

SEKTOR EKONOMI

Kunjungan Wisatawan

Pada Bulan Februari 2021 tercatat tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pintu masuk Bandara Internasional Yogyakarta. Kondisi yang sama juga terjadi pada bulan sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum mereda. Secara umum, pola kedatangan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 dan 2020 signifikan berbeda. Pada tahun 2019, tingkat kedatangan wisatawan mancanegara tercatat tinggi pada Bulan Maret, Juli, Agustus, dan berada di titik terendah pada Bulan Juni dengan rata-rata 9.419 kunjungan per bulan. Pada Januari 2020, kunjungan wisman sempat lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2019. Namun, sejak terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan merosotnya kunjungan wisman ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat, sejak Maret 2020 kunjungan wisman mengalami penurunan, bahkan mencapai titik terendah pada bulan April, Mei, Juli hingga Desember 2020. Memasuki bulan kedua di tahun 2021, kunjungan wisman ke Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat masih nihil seperti pada kondisi bulan sebelumnya (BRS-BPS 2021). Data Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk Bandara Internasional Yogyakarta tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk YIA

Kebangsaan	Jumlah Kunjungan					% Perubahan		
	Feb 2020	Jan 2021	Feb 2021	Jan-Feb 2020	Jan-Feb 2021	Feb2021 thd Feb2020	Feb2021 thd Jan2021	Jan-Feb2021 thd Jan-Feb2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Malaysia	3.942	-	-	7.640	-	-100,00	-	-100,00
Singapura	679	-	-	1.784	-	-100,00	-	-100,00
Jepang	229	-	-	465	-	-100,00	-	-100,00
Tiongkok	21	-	-	435	-	-100,00	-	-100,00
Jerman	187	-	-	320	-	-100,00	-	-100,00
India	133	-	-	316	-	-100,00	-	-100,00
Inggris	109	-	-	262	-	-100,00	-	-100,00
Perancis	107	-	-	256	-	-100,00	-	-100,00
Thailand	91	-	-	227	-	-100,00	-	-100,00
Belanda	104	-	-	197	-	-100,00	-	-100,00
Lainnya	1.499	-	-	3.585	-	-100,00	-	-100,00
Jumlah	7.107	-	-	15.487	-	-100,00	-	-100,00

Keterangan: *)Kedatangan wisatawan mancanegara dari pintu masuk Bandara Internasional Yogyakarta sejak Juni 2020

Sumber: Data BPS DIY 2020

Sarana Akomodasi Hotel

Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta di dukung oleh sejumlah sarana prasarana yang memadai. Ragam pilihan destinasi wisata, kuliner, kemudahan akses dan transportasi serta didukung pula fasilitas akomodasi yang sangat memadai. Sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 780 hotel ada di DIY. Datanya tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2. Jumlah Hotel

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Hotel	685	685	773	790	Unit
1,1	Jumlah Hotel Bintang Lima	9	9	11	11	Unit
1,2	Jumlah Hotel Bintang empat	18	18	36	42	Unit
1,3	Jumlah Hotel Bintang Tiga	32	32	61	68	Unit
1,4	Jumlah Hotel Bintang Dua	24	24	34	33	Unit
1,5	Jumlah Hotel Bintang Satu	13	13	21	18	Unit
1,6	Jumlah Hotel Non Bintang	589	589	610	618	Unit

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Pandemi Covid-19 yang telah setahun lebih bercokol di Indonesia nyatanya tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sektor lain terutama Industri pariwisata turut mengalami dampak yang dahsyat. Di Yogyakarta, puluhan hotel terpaksa gulung tikar sebagai imbas kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk meredam penyebaran Covid-19. Karyawannya pun harus menerima kenyataan pahit dirumahkan. Jumlah tenaga kerja pariwisata khususnya yang bekerja di Hotel berbintang di DIY cukup banyak, seperti tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3. Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang	6.557	6.747	7.256	1.258*	Orang
1,1	Laki-Laki	4.374	4.482	4.754	945*	Orang
1,2	Perempuan	2.183	2.265	2.474	313*	Orang

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Tingkat Hunian Hotel

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi. Adanya pandemi Covid-19 ini tentu saja sangat memukul industry perhotelan khususnya di DIY. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pembatasan perjalanan antar daerah, pembatasan penyelenggaraan acara yang mengundang banyak orang serta pembatasan kegiatan wisata tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel. TPK hotel bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2021 mencapai rata-rata 26,87% atau

naik 1,96 poin dibandingkan TPK Januari 2021 yang tercatat sebesar 24,91%. Sementara itu, apabila dibanding dengan TPK Februari 2021 yang tercatat 56,32%, TPK Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 29,45 poin. TPK tertinggi pada Bulan Februari 2021 tercatat pada hotel bintang lima yang mencapai 38,15%, dan TPK terendah tercatat pada hotel bintang satu yaitu sebesar 13,37%. Data elemen Jumlah Hotel serta data TPK Hotel berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4. TPK Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta

Klasifikasi Hotel	TPK (%)			Perub Feb'21 terhadap Feb'20 (poin)	Perub Feb'21 terhadap Jan'21 (poin)
	Feb'20	Jan'21	Feb'21		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bintang 1	30,01	9,21	13,37	-16,64	4,16
Bintang 2	59,45	32,03	32,17	-27,28	0,14
Bintang 3	60,19	31,04	30,10	-30,09	-0,94
Bintang 4	52,02	20,63	21,37	-30,65	0,74
Bintang 5	62,98	21,52	38,15	-24,83	16,63
Seluruh Bintang	56,32	24,91	26,87	-29,45	1,96

Sumber: Data BPS DIY 2020

Pariwisata di DIY

Pandemi Covid-19 yang menghantam 2 sendi ekonomi utama DIY, yaitu pariwisata dan pendidikan dan telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi anjlok. Dua sector tersebut mengandalkan mobilitas masyarakat dan kerumunan yang pada masa pandemi ini sangat ketat dibatasi. Hal tersebut langsung berdampak sangat luar biasa pada struktur perekonomian DIY. Misalnya pada triwulan pertama 2020, perekonomian DIY mengalami minus 0,16%. Angka ini terus turun di triwulan kedua hingga minus 6,7%. Pada triwulan ketiga, baru terjadi peningkatan walaupun hasilnya masih di

angka minus 2,84%. Angka ini juga sudah melebihi rata-rata ekonomi nasional di posisi minus 3,49%. Utamanya pada sektor Pariwisata yang sangat terpukul karena beberapa bulan di awal-awal masa Pandemi vakum sama sekali tidak ada aktifitas wisata di DIY. Namun setelah pandemic mulai bisa di tangani dan perlahan di tanggulasi, pemerintah mengambil kebijakan untuk melonggarkan aktifitas wisata dengan sangat ketat menerapkan protocol kesehatan.

Dari dua aplikasi pemerintah DIY, yakni Visiting Jogja dan Jogja Pass, diketahui kunjungan wisatawan ke Yogya selama masa pandemi masih cukup bisa diharapkan untuk pemulihan perekonomian. Dari kedua aplikasi itu, di dapatkan data dari bulan Juli sampai November 2020, total orang yang datang ke Yogya terdata 1,67 juta lebih sedikit. Terkait elemen Jenis Objek Wisata tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.5. Jenis Objek Wisata

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jenis Objek Wisata Marina					
1,1	Jumlah Objek Wisata	13	15	15	17	Unit
1,2	Jumlah Wisatawan Nusantara	7.266.787	6.807.945	7.023.363	3.639.624	Orang
1,3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	11.051	14.948	15.396	2.369	Orang
2	Jenis Objek Wisata Tirta					
2,1	Jumlah Objek Wisata	4	6	7	8	Unit
2,2	Jumlah Wisatawan Nusantara	265.461	604.707	754.385	70.721	Orang
2,3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	0	0	0	0	Orang
3	Jenis Objek Wisata Sejarah					

No	Sub Elemen	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	Satuan
3,1	Jumlah Objek Wisata	17	17	17	17	Unit
3,2	Jumlah Wisatawan Nusantara	3.963.920	3.883.381	3.999.882	1.316.733	Orang
3,3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	4.782.910	448.686	461.873	56.867	Orang
4	Jenis Objek Wisata Alam					
4,1	Jumlah Objek Wisata	12	17	17	17	Unit
4,2	Jumlah Wisatawan Nusantara	3.999.876	4.715.377	4.862.408	374.938	Orang
4,3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	7.968	2.800	122.001	43.168	Orang
5	Jenis Objek Wisata Museum					
5,1	Jumlah Objek Wisata	30	30	30	31	Unit
5,2	Jumlah Wisatawan Nusantara	2.586.501	2.351.781	2.426.700	374.938	Orang
5,3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	42.052	35.950	25.620	172	Orang
6	Jenis Objek Wisata Desa Wisata					
6,1	Jumlah Objek Wisata	59	62	67	67	Unit
6,2	Jumlah Wisatawan Nusantara	3.005.692	1.805.641	4.568.084	307.716	Orang
6,3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	28.368	45.260	16.872	172	Orang
7	Jenis objek wisata lainnya					
7,1	Total Objek Wisata	13	15	21	21	Buah
7,2	Total Wisatawan Nusantara	4.273.434	4.971.042	5.126.990	0	Jiwa
7,3	Total Wisatawan Mancanegara	22.721	28.743	26.190	0	Jiwa
8	Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan	107,65	105,24	106,03	20,26	%

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Kebangkitan pariwisata di Yogyakarta setelah terpukul akibat Pandemi yang melanda adalah tanggung jawab seluruh pihak. Bukan hanya urusan Dinas Pariwisata. Bukan pula bergantung kerja pengelola tempat wisata. Dan bukan hanya urusan biro perjalanan, pengelola transportasi, juga bukan tugas orang-orang hotel saja. Daerah Istimewa Yogyakarta mengandalkan sejumlah objek wisata baik wisata alam, wisata buatan maupun wisata sejarah. Selain itu geliat desa wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak pengelola wisata di sejumlah tempat tentunya sangat dinantikan. Beragam inovasi dan jurus sakti dalam menarik wisatawan perlu diupayakan agar segera mendorong bangkitnya pariwisata DIY dalam masa New Normal ini. Adapun data terkait jumlah objek wisata, desa wisata dan Pokdarwis tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.6. Pariwisata DIY

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Objek Wisata					
1,1	Jumlah Objek Wisata Alam	12	17	32	32	Unit
1,2	Jumlah Objek Wisata Buatan	13	15	42	42	Unit
1,3	Jumlah Objek Wisata Sejarah	17	17	17	17	Unit
2	Jumlah Desa Wisata					
2,1	Jumlah Desa Wisata Maju	24	25	48	60	Desa
2,2	Jumlah Desa Wisata Berkembang	30	57	39	33	Desa
2,3	Jumlah Desa Wisata Tumbuh/Embrio	31	50	48	48	Desa
2,4	Jumlah Desa Wisata Layak Jual	31	82	135	141	Desa
3	Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di DIY	1350*	1290	1310	1310	Kelompok
3,1	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Gunungkidul	15	41	42	42	Kelompok
3,2	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Kulon Progo	40	20	20	20	Kelompok
3,3	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Sleman	36	15	15	15	Kelompok
3,4	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Bantul	23	39	40	40	Kelompok
3,5	Jumlah Pokdarwis di Kota Yogyakarta	21	14	14	14	Kelompok

Sumber : Jogja Dataku, 2020

B. Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selalu ada anugerah dalam musibah. Seperti itulah gambaran terhadap sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19 yang juga tengah melanda Indonesia. Bagaimana tidak? Menurut data BPS, sektor pertanian justru tumbuh hingga 16,4% selama pandemi ini. Hal ini dipaparkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pencanangan Gerakan Diversifikasi dan Ekspose UMKM Pangan Lokal yang digelar virtual pada Rabu (19/08).

Meski banyak sektor terpuruk, justru sektor pertanian tampil gagah di tengah pandemi. Ketika banyaknya kendala ekspor import di sektor lain, inilah momentum yang tepat untuk sektor agro bangkit dengan memanfaatkan terbukanya peluang dalam mengakselerasi pertumbuhannya. Saat ini menjadi waktu yang tepat pula untuk pencanangan gerakan diversifikasi pangan lokal. Guna menyertai gerakan ini, tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki pilihan untuk mengembalikan tradisi olah pangan lokal non beras yang menjadi komoditas daerahnya. Berbagai masyarakat di daerah tentu mempunyai tradisi lokal dalam menangani keamanan pangan yang selama ini cenderung dilupakan atas nama modernisasi pertanian. Dan pemerintah perlu memfasilitasi revitalisasi pranata-pranata lokal, karena esensi dan eksistensinya desa berpotensi dan mampu mewujudkan ketahanan dan diversifikasi pangan.

Penggunaan Lahan Pertanian

Guna mewujudkan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan yang kuat, maka perlu penyediaan lahan yang mencukupi guna mendukung ketercapaian program. Data terkait elemen luas baku lahan menurut jenis lahan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Lahan Sawah	52.474	52.304	52.172 *	52.172 *	Ha
1,1	Sawah Irigasi	42.877	43.378	43.009 *	43.009 *	Ha
1.1.1	Ditanami padi	42.081	40.792	40.837 *	40.837 *	Ha
1.1.2	Ditanami tanaman lain	790	2.583	2.158 *	2.158 *	Ha
1.1.3	Sementara tidak diusahakan	6	3	13 *	13 *	Ha
1,2	Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	9.597	8.926	9.163 *	9.163 *	Ha
1.2.1	Ditanami padi	9.262	8.668	8.888 *	8.888 *	Ha
1.2.2	Ditanami tanaman lain	335	258	205 *	205 *	Ha
1.2.3	Sementara tidak diusahakan	0	0	70 *	70 *	Ha
1,3	Total Lahan Sawah	524.740	523.040	521.725 *	521.725 *	Ha
1.3.1	Ditanami padi	51.343	49.460	49.726 *	49.726 *	Ha
1.3.2	Ditanami tanaman lain	1.125	2.841	2.363 *	2.363 *	Ha
1.3.3	Sementara tidak diusahakan	6	3	83 *	83 *	Ha
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	185.570	187.919	187.308 *	187.308 *	Ha
2,1	Tegal/Kebun	103.112	100.893	103.745 *	103.745 *	Ha
2,2	Lahan yang sementara tidak diusahakan	2.376	403	1.766 *	1.766 *	Ha
2,3	Lainnya (perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/tebat/empang, dll)	80.082	86.623	81.710 *	81.710 *	Ha
2,4	Lahan/Huma	0	n/a	86 *	86 *	Ha
3	Lahan Bukan Pertanian (rumah, bangunan dan halaman, hutan negara, rawa - rawa, yang tidak ditanami dll)	80.536	78.358	78.358 *	78.358 *	Ha

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Dalam penggunaan lahan, lahan sawah memiliki kekhususan karena kebutuhan tanaman padi yang khas. Luas areal sawah pun dari tahun ke tahun semakin menyusut karena alih fungsi lahan sawah menjadi fungsi lain. Dalam kaitanya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, DIY telah mempunyai Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan Perda tersebut diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian pangan dapat di kendalikan sehingga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras dapat dikendalikan. Data elemen perubahan penggunaan sawah, penggunaan lahan per sektor dan lahan pertanian tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8. Perubahan Penggunaan Sawah

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Perubahan Penggunaan Sawah					
1,1	Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah	251	170	170 *	170 *	Ha
1,2	Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi Non Sawah	2.818	392,34	392,34 *	392,34 *	Ha

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Tabel 5.9. Penggunaan Lahan (Land Use) Per Sektor

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian ditanami padi	51.343	49.459	49.726 *	49.726	Ha
1,1	Sawah Tanam Padi 1 Kali Setahun	5.773	4.764	8.377 *	8.377	Ha
1,2	Sawah Tanam Padi 2 Kali Setahun	34.201	30.941	27.899 *	27.899	Ha
1,3	Sawah Tanam Padi 3 Kali Setahun	11.369	13.754	13.449 *	13.449	Ha
2	Pertanian tidak ditanami padi	1.125	284,10	205 *	205	Ha
3	Sementara tidak diusahakan	6	3	70 *	70	Ha
4	Pertanian Tanah Kering Semusim	185.570	187.918	187.308 *	187.308	Ha

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Tabel 5.10. Lahan Pertanian

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Padi Sawah					
1,1	Luas Tanam	112.385	105.870	95.476	94.837	Ha
1,2	Luas Panen	114.384	92.035	102.054	102.886	Ha
1,3	Produksi Gabah	678.530	497.599	621.202	628.419	Ton
1,4	Produksi Beras	423.402	313.785	397.693	402.314	Ton
1,5	Produktivitas	59,32	54,07	60,87	61	Kw/Ha
2	Padi Ladang					
2,1	Luas Tanam	45.148	44.223	44.504	42.942	Ha
2,2	Luas Panen	44.433	45.341	40.413	40.487	Ha
2,3	Produksi Gabah	202.576	214.907	189.778	195.013	Ton
2,4	Produksi Beras	126.407	135.520	121.495	124.847	Ton
2,5	Produktivitas	45,59	47,4	46,96	48,17	Kw/Ha
3	Jagung					
3,1	Luas Tanam	67.917	65.643	70.012	67.678	Ha
3,2	Luas Panen	62.520	61.356	66.207	65.823	Ha
3,3	Produksi	311.764	309.221	366.031	365.828	Ton
3,4	Produktivitas	49,87	50,4	55,29	56	Kw/Ha
4	Kacang Kedelai					
4,1	Luas Tanam	6.468	8.659	5.006	5.414	Ha

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
4,2	Luas Panen	6.533	8.703	5.249	5.874	Ha
4,3	Produksi	8.656	10.931	5.041	7.795	Ton
4,4	Produktivitas	13,25	12,56	9,6	13	Kw/Ha
5	Kacang Hijau					
5,1	Luas Tanam	542	445	276	635	Ha
5,2	Luas Panen	518	447	273	663	Ha
5,3	Produksi	301	376	226	415	Ton
5,4	Produktivitas	5,8	8,4	6,13	6	Kw/Ha
6	Kacang Tanah					
6,1	Luas Tanam	65.763	65.809	62.846	61.654	Ha
6,2	Luas Panen	68.082	65.453	64.028	59.830	Ha
6,3	Produksi	79.907	80.172	80.682	74.319	Ton
6,4	Produktivitas	11,74	12,25	12,6	12	Kw/Ha
7	Ubi Kayu					
7,1	Luas Tanam	49.662	49.785	47.030	45.500	Ha
7,2	Luas Panen	54.200	49.876	49.314	46.697	Ha
7,3	Produksi	1.025.641	890.898	778.806	1.060.899	Ton
7,4	Produktivitas	189,23	178,62	157,93	227	Kw/Ha
8	Ubi Jalar					
8,1	Luas Tanam	253	210	177	149	Ha
8,2	Luas Panen	312	215	206	168	Ha
8,3	Produksi	5.289	4.113	3.149	2.311	Ton
8,4	Produktivitas	169,14	191,3	152,2	137	Kw/Ha
9	Luas Kawasan (KP2B)	51.770,17	104.905,76	104.905,76	104.905,76	Ha

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Sub Sektor Hortikultura

Pandemi Covid-19 ini sepertinya memberikan dampak positif bagi para petani Hortikultura. Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Pasalnya, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat ini menjadi prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin, guna meningkatkan daya imun tubuh. Selain tanaman buah dan sayur, tanaman hias juga naik daun dan menjadi primadona baru yang banyak dicari oleh masyarakat. Adanya aturan tentang pembatasan kegiatan di luar rumah dan skema WFH dan WFO menjadikan trend tanaman hias menjadi fenomena tersendiri di tengah pandemi ini.

Ditengah pandemi saat ini permintaan di sektor hortikultura khususnya untuk produk buah dan sayur justru makin meningkat. Dengan demikian pasar domestik tetap berjalan meski terjadi perubahan ekonomi global. Kondisi ini jelas menjadi peluang bisnis tersendiri. Pemenuhan boost imunity inilah yang menjadi peluang bisnis hortikultura. Dalam rangka pembatasan social yang diterapkan pemerintah inilah bisnis online shopping bergerak lincah. Adanya keinginan untuk kehidupan yang lebih baik inilah masyarakat berupaya untuk menyediakan gizi yang lebih baik demi menjaga kesehatan.

Data-data terkait Hortikultura baik komoditas, luas panen, jumlah produksi dan produktivitas tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.11. Lahan Hortikultura

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Mangga					
1,1	Luas Panen	3.251,05	6.840,50	8.244,22	2.953,67	Ha
1,2	Jumlah Produksi	32.237,80	61.171,40	58.130	14.015,41	Ton
1,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	325.105	684.050	824.422	295.367	Pohon
1,4	Produktivitas perLuas	99,16	89,43	70,51	47,45	Kw/Ha
1,5	Produktivitas pepohonan	0,99	1,06	0,70	0,47	Kw/Pohon
2	Jeruk					
2,1	Luas Panen	106,92	110	152,26	143,71	Ha
2,2	Jumlah Produksi	2.110,30	2.443	3.004,50	1.914,59	Ton
2,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	32.077	38.508	45.668	43.112	Pohon
2,4	Produktivitas perLuas	197,37	222,04	197,37	133,23	Kw/Ha
2,5	Produktivitas pepohonan	0,66	0,63	0,66	0,44	Kw/Pohon
3	Pepaya					
3,1	Luas Panen	117,29	159,62	182,28	411,33	Ha
3,2	Jumlah Produksi	6.038	6.815,10	8.376,20	11.919,43	Ton
3,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	117.289	159.623	182.284	411.329	Pohon
3,4	Produktivitas perLuas	514,80	426,96	459,52	289,78	Kw/Ha
3,5	Produktivitas pepohonan	0,51	0,43	0,46	0,29	Kw/Pohon
4	Pisang					

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
4,1	Luas Panen	958,63	1.108,92	11.195,17	2.422,37	Ha
4,2	Jumlah Produksi	40.920,70	45.065,60	47.554,30	57.463,49	Ton
4,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	958.629	1.108.920	1.119.517	2.422.365	Pohon
4,4	Produktivitas perLuas	426,87	406,39	424,77	237,22	Kw/Ha
4,5	Produktivitas pepohonan	0,43	0,41	0,42	0,24	Kw/Pohon
5	Nanas					
5,1	Luas Panen	2,96	3,01	3,16	4,88	Ha
5,2	Jumlah Produksi	532,60	418,70	496,20	427,25	Ton
5,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	73.949	75.152	78.902	121.734	Rumpun
5,4	Produktivitas perLuas	1.799,32	1.391,03	1.570,20	876,33	Kw/Ha
5,5	Produktivitas pepohonan	0,07	0,05	0,06	0,04	Kw/Pohon
6	Durian					
6,1	Luas Panen	776	1.025,98	1.135,04	891,08	Ha
6,2	Jumlah Produksi	6.766,70	6.596,20	6.264,70	4.637,10	Ton
6,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	77.600	102.598	113.504	89.108	Pohon
6,4	Produktivitas perLuas	87,20	64,29	55,19	52,04	Kw/Ha
6,5	Produktivitas pepohonan	0,87	0,64	0,55	0,52	Kw/Pohon
7	Manggis					
7,1	Luas Panen	228,84	292,69	470,17	515,64	Ha
7,2	Jumlah Produksi	1.801,60	1.652,30	2.938,90	1.515,19	Ton

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
7,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	22.884	29.269	47.017	51.564	Pohon
7,4	Produktivitas perLuas	78,73	56,45	62,51	29,38	Kw/Ha
7,5	Produktivitas pepohonan	0,79	0,56	0,62	0,29	Kw/Pohon
8	Melon					
8,1	Luas Panen	944	1.502	1.252	1.015,95	Ha
8,2	Jumlah Produksi	17.861,40	30.742,10	24.015,80	20.763,82	Ton
8,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	16.048	88.352,94	21.284,00	58.925,10	Pohon
8,4	Produktivitas perLuas	189,21	204,67	191,80	204,38	Kw/Ha
8,5	Produktivitas pepohonan	11,13	3,48	0,11	3,52	Kw/Pohon
9	Alpukat					
9,1	Luas Panen	219,92	402,62	306,10	392,22	Ha
9,2	Jumlah Produksi	3.777,10	3.149,20	2.385	1.840,84	Ton
9,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	21.992	40.262	30.610	39.222	Pohon
9,4	Produktivitas perLuas	171,75	78,22	77,92	46,93	Kw/Ha
9,5	Produktivitas pepohonan	1,72	0,78	0,78	0,47	Kw/Pohon
10	Belimbing					
10,1	Luas Panen	45,93	57,05	66,89	90,68	Ha
10,2	Jumlah Produksi	611,80	744,40	824,90	546,25	Ton
10,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	13.780	17.116	20.067	27.205	Pohon

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
10,4	Produktivitas perLuas	133,19	130,47	123,32	60,24	Kw/Ha
10,5	Produktivitas pepohonan	0,44	0,43	0,41	0,20	Kw/Pohon
11	Duku/Langsar					
11,1	Luas Panen	171,62	202,83	300,59	264,54	Ha
11,2	Jumlah Produksi	1.489,40	1.373,50	1.763,30	1.766,26	Ton
11,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	17.162	20.283	30.059	26.454	Pohon
11,4	Produktivitas perLuas	86,78	67,72	58,66	66,77	Kw/Ha
11,5	Produktivitas pepohonan	0,87	0,68	0,59	0,67	Kw/Pohon
12	Jambu Biji					
12,1	Luas Panen	205,59	265,31	272,81	245,54	Ha
12,2	Jumlah Produksi	2.116,50	2.410,90	2.754,10	3.679,66	Ton
12,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	61.676	79.594	81.843	73.662	Pohon
12,4	Produktivitas perLuas	102,95	90,87	100,95	149,86	Kw/Ha
12,5	Produktivitas pepohonan	0,34	0,30	0,34	0,50	Kw/Pohon
13	Jambu Air					
13,1	Luas Panen	206,83	441,13	643,64	538,23	Ha
13,2	Jumlah Produksi	2.724,90	2.287,80	2.588,20	2.718,23	Ton
13,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	20.683	4.413	64.364	53.823	Pohon
13,4	Produktivitas perLuas	131,75	51,86	40,22	50,50	Kw/Ha

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
13,5	Produktivitas pepohonan	1,32	0,52	0,40	0,51	Kw/Pohon
14	Nangka/Cempedak					
14,1	Luas Panen	1.119,91	1.510,53	1.587,77	2.162,40	Ha
14,2	Jumlah Produksi	12.823,90	13.381,50	12.172	11.557,25	Ton
14,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	111.991	151.053	158.777	216.240	Pohon
14,4	Produktivitas perLuas	114,51	88,59	76,66	53,45	Kw/Ha
14,5	Produktivitas pepohonan	1,15	0,89	0,77	0,53	Kw/Pohon
15	Salak					
15,1	Luas Panen	1.413,66	3.012,81	1.860,69	4.346,55	Ha
15,2	Jumlah Produksi	37.913,40	90.295,50	41.119,80	27.569,32	Ton
15,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	2.827.317	6.025.627	3.721.370	8.693.093	Pohon
15,4	Produktivitas perLuas	268,19	299,70	220,90	63,43	Kw/Ha
15,5	Produktivitas pepohonan	0,13	0,15	0,11	0,03	Kw/Pohon
16	Rambutan					
16,1	Luas Panen	1.915,18	2.227,79	2.545,35	1.301,64	Ha
16,2	Jumlah Produksi	12.406,50	10.287,80	9.547,20	4.109,84	Ton
16,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	191.518	222.779	254.535	130.164	Pohon
16,4	Produktivitas perLuas	64,78	46,18	37,51	31,57	Kw/Ha
16,5	Produktivitas pepohonan	0,65	0,46	0,37	0,32	Kw/Pohon
17	Sawo					

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
17,1	Luas Panen	356,23	450,80	485,81	569,15	Ha
17,2	Jumlah Produksi	4.667,20	4.420,50	3.988,80	1.986,13	Ton
17,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	35.623	45.080	48.581	56.915	Pohon
17,4	Produktivitas perLuas	131,02	9.806	82,11	34,90	Kw/Ha
17,5	Produktivitas pepohonan	1,31	0,98	0,82	0,35	Kw/Pohon
18	Sirsak					
18,1	Luas Panen	178,89	229,68	196,62	416,06	Ha
18,2	Jumlah Produksi	1.534,60	2.177,80	1.929,40	10.725,63	Ton
18,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	53.667	68.904	58.397	123.571	Pohon
18,4	Produktivitas perLuas	85,78	94,82	98,13	257,79	Kw/Ha
18,5	Produktivitas pepohonan	0,29	0,32	0,33	0,87	Kw/Pohon
19	Markisa					
19,1	Luas Panen	1,96	2,28	2,18	3,05	Ha
19,2	Jumlah Produksi	105,40	112,90	110,40	2,10	Ton
19,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	1.958	2.280	2.176	3.054	Pohon
19,4	Produktivitas perLuas	538,30	495,18	506,42	6,88	Kw/Ha
19,5	Produktivitas pepohonan	0,54	0,52	0,51	0,01	Kw/Pohon
20	Sukun					
20,1	Luas Panen	735,28	841,35	853,80	1.006,76	Ha

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
20,1	Luas Panen	735,28	841,35	853,80	1.006,76	Ha
20,2	Jumlah Produksi	6.311,60	6.969,10	6.387,60	21.419,74	Ton
20,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	73.528	84.135	85.380	100.676	Pohon
20,4	Produktivitas perLuas	85,84	82,83	74,81	212,76	Kw/Ha
20,5	Produktivitas pepohonan	0,86	0,83	0,75	2,13	Kw/Pohon
21	Melinjo					
21,1	Luas Panen	1.753	1.658,05	1.839,06	2.719,79	Ha
21,2	Jumlah Produksi	14.645,50	13.924,90	16.350,30	15.628,23	Ton
21,3	Total Jumlah Pohon yang Menghasilkan	380.236	460.937	511.259	756.102	Pohon
21,4	Produktivitas perLuas	83,54	83,98	88,91	57,46	Kw/Ha
21,5	Produktivitas pepohonan	0,39	0,30	0,32	0,21	Kw/Pohon
22	Bawang Merah					
22,1	Luas Panen	1.423	1.499	1.740	2.012,21	Ha
22,2	Jumlah Produksi	13.980,10	14.949,70	16.998,50	19.146,82	Ton
22,3	Produktivitas Perluasan	98,24	99,73	97,72	95,15	Kw/Ha
23	Kubis					
23,1	Luas Panen	0	0	0	0	Ha
23,2	Jumlah Produksi	0	0	0	0	Ton
23,3	Produktivitas Perluasan	0	0	0	0	Kw/Ha
24	Cabai					
24,1	Luas Panen	4.934	5.152	5.458	6.204,35	Ha

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
24,2	Jumlah Produksi	37.902,60	44.590,10	42.972,40	54.559,82	Ton
24,3	Produktivitas Perluasan	76,82	82,52	74,63	87,94	Kw/Ha
25	Petsai/Sawi					
25,1	Luas Panen	438	397	361	373,98	Ha
25,2	Jumlah Produksi	3.630,50	3.240,70	3.093,90	2.908,90	Ton
25,3	Produktivitas Perluasan	82,89	81,63	85,70	77,78	Kw/Ha
26	Daun Bawang					
26,1	Luas Panen	34	17	14	14	Ha
26,2	Jumlah Produksi	326,50	168,80	141,20	134,70	Ton
26,3	Produktivitas Perluasan	96,03	99,29	100,86	96,21	Kw/Ha
27	Kembang Kol					
27,1	Luas Panen	39	29	30	25,06	Ha
27,2	Jumlah Produksi	453,20	319,20	260,50	225,30	Ton
27,3	Produktivitas Perluasan	116,21	110,07	86,83	89,90	Kw/Ha

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Sektor pertanian dan peternakan harus menjadi kebutuhan prioritas dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sektor ini tidak bisa dianggap remeh, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia. Selanjutnya yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga yang wajar atau normal bagi seluruh masyarakat. Penyebaran Covid-19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor. Salah satu imbasnya adalah terganggunya produksi petani di seluruh daerah.

Tabel 5.12. Peternakan

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Ternak Sapi Potong					
1,1	Jumlah Populasi	309.960	313.425	304.423	306.496	Ekor
1,2	Jumlah Pemotongan per Tahun	39.023	34.951	37.997	35.585	Ekor
1,3	Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	0,30	1,11	-2,87	1,43	%
2	Ternak Sapi Perah					
2,1	Jumlah Populasi	4.003	3.747	3.873	3.537	Ekor
2,2	Jumlah Produksi Susu per Tahun	6.124.590	4.059.473	5.925.690	5.411.610	Liter
2,3	Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	-1,62	-6,39	3,30	-0,15	%
3	Ternak Kecil					
3,1	Jumlah Populasi Kambing	401.219	405.948	402.943	406.613	Ekor
3,2	Jumlah Populasi Domba	194.788	148.942	143.957	146.668	Ekor
3,3	Jumlah Populasi Babi	16.634	14.339	16.214	14.261	Ekor
3,4	Jumlah Populasi Kerbau	646	616	510	512	Ekor
3,5	Jumlah Populasi Kuda	1.951	1.914	1.846	1.779	Ekor
3,6	Jumlah Populasi Kelinci	28.701	38.658	44.703	42.509	Ekor

Sub Sektor Peternakan

Selain berpengaruh terhadap eksistensi perekonomian, Covid-19 juga diprediksi akan memukul eksistensi sektor pertanian dan peternakan, jika perkembangan semakin meluas seiring dengan tidak disiplinya masyarakat dalam menerima himbauan pemerintah serta keterbatasan pemerintah dalam memaksimalkan pencegahan dan penanganan.

Data-data dari elemen data Peternakan di Aplikasi Dataku baik ternak ruminansia, ternak kecil, unggas dan data jumlah ternak masuk maupun keluar tersaji dalam tabel berikut ini:

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
4	Unggas					
4,1	Ayam Buras					
4.1.1	Jumlah Populasi	4.530.899	3.584.305	3.622.616	3.661.846	Ekor
4.1.2	Jumlah Produksi Daging	5.682,03	6.076,08	5.259,72	5.316,67	Ton
4.1.3	Jumlah Produksi Telur	2.849,11	2.289,48	2.313,94	2.339	Ton
4,2	Ayam Petelur					
4.2.1	Jumlah Populasi	3.418.237	3.514.189	3.489.305	3.716.582	Ekor
4.2.2	Jumlah Produksi Telur	26.354,61	27.094,40	27.295,60	26.865,41	Ton
4.2.3	Jumlah Produksi Daging	3.907,71	3.914,95	3.047,06	2.999	Ton
4.2.4	Jumlah Kelompok Peternak	n/a	n/a	n/a	n/a	Kelompok
4,3	Ayam Pedaging					
4.3.1	Jumlah Populasi	6.668.834	6.209.515	51.245.533	48.023.309	Ekor
4.3.2	Jumlah Produksi Daging	34.273,98	29.982,96	56.504	52.951	Ton
4.3.3	Jumlah Kelompok Peternak	n/a	n/a	n/a	n/a	Kelompok
4,4	Itik					
4.4.1	Jumlah Populasi	496.196	416.405	411.044	413.532	Ekor

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
4.4.2	Jumlah Produksi Telur	2.724,12	2.286,06	2.256,63	2.270,29	Ton
4.4.3	Jumlah Produksi Daging	565,15	509,60	386,37	388,71	Ton
4.4.4	Jumlah Kelompok Peternak	15	42	45	45	Kelompok
4,5	Itik Manila					
4.5.1	Jumlah populasi	28.551	69.398	68.842	70.133	Ekor
4.5.2	Jumlah Produksi Telur	156,75	380,99	377,94	385,03	Ton
4.5.3	Jumlah Produksi Daging	13,12	30,21	39,24	39,98	Ton
4.5.4	Jumlah Kelompok Peternak	2	2	2	2	Kelompok
4,6	Burung Puyuh					
4.6.1	Jumlah Populasi	2.114.059	1.751.823	1.856.978	1.612.703	Ekor
4.6.2	Jumlah Produksi Telur	3.665,78	2.599,90	3.220	2.796,43	Ton
4.6.3	Jumlah Produksi Daging	71,91	250,72	95	82,50	Ton
4.6.4	Jumlah Kelompok Peternak	n/a	n/a	n/a	n/a	Ton
4,7	Burung Dara					
4.7.1	Jumlah Populasi	64.373	86.558	69.508	81.523	Ekor
4.7.2	Jumlah Produksi Telur	n/a	n/a	n/a	n/a	Ton
4.7.3	Jumlah Produksi Daging	12,71	24,99	17,37	20,38	Ton
4.7.4	Jumlah Kelompok Peternak	n/a	n/a	n/a	n/a	Kelompok
5	Industri Peternakan					
5,1	Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	2*	3	3	3	Unit
5,2	Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong	2	0	2	2	Unit
5,3	Jumlah Pabrik Pakan Ternak	9	8	8	8	Unit
5,4	Jumlah Industri Pengolah Susu (IPS)	6	1	1	1	Unit
6	Jumlah Koperasi Peternakan	2	3	3	4	Unit
7	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	5	5	5	5	Unit

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
8	Komoditas Masuk					
8,1	Ternak					
8.1.1	Sapi Potong	24.900	36.785	21.715	840	Ekor
8.1.2	Sapi Perah	n/a	272	410	0	Ekor
8.1.3	Kerbau	n/a	3	133	155	Ekor
8.1.4	Kambing	23.375	75.748	73.327	2.328	Ekor
8.1.5	Domba	41.050	126.830	132.392	2.014	Ekor
8.1.6	Babi	10.040	5	11.938	73	Ekor
8.1.7	Kuda	n/a	243	243	0	Ekor
8.1.8	Ayam Buras	145.150	2.070.419	9.643.777	46.624	Ekor
8.1.9	Ayam Ras Petelur	8.422	3.619.705	4.185.459	50.006	Ekor
8.1.10	Ayam Ras Pedaging	53.100	31.873.74	39.028.30	517.505	Ekor
8.1.11	Itik	n/a	458.428	857.908	2.934	Ekor
8.1.12	Kelinci	n/a	6.096	7.904	0	Ekor
8.1.13	Puyuh	n/a	2.136.792	1.794.060	159.600	Ekor
8.1.14	Merpati	n/a	127.765	122.609	0	Ekor
8.1.15	Itik Manila	n/a	51.240	59.431	0	Ekor
9	Komoditas Keluar					
9,1	Ternak					
9.1.1	Sapi Potong	18.300	43.305	40.611	484	Ekor
9.1.2	Sapi Perah	n/a	505	737	0	Ekor
9.1.3	Kerbau	n/a	161	133	0	Ekor
9.1.4	Kambing	57.100	44.504	26.873	1.441	Ekor
9.1.5	Domba	15.920	18.296	3.289	1.248	Ekor
9.1.6	Babi	3.000	15.617	11.262	122	Ekor
9.1.7	Kuda	3	0	12	8	Ekor
9.1.8	Ayam Buras	24.700	1.484.322	13.812.271	6.169	Ekor
9.1.9	Ayam Ras Petelur	n/a	227.908	107.027	3.497	Ekor
9.1.10	Ayam Ras Pedaging	1.636.000	82.349	4.540.874	76.120	Ekor
9.1.11	Itik	42.300	63.981	47.356	2.193	Ekor
9.1.12	Kelinci	1.440	0	5.533	0	Ekor
9.1.13	Puyuh	n/a	119.734	33.923	0	Ekor
9.1.14	Merpati	n/a	n/a	14.950	0	Ekor
9.1.15	Itik Manila	n/a	6.367	9.837	0	Ekor

Sumber : Jogja Dataku, 2020

C. Koperasi dan UKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling merasakan sangat terpuuk atas dampak dari pandemi Covid-19 pada wilayah DIY. Bahkan analisa Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY yang bersumber dari olahan data Dinas Koperasi UKM DIY, menunjukkan lebih dari 55% konsumen tidak dapat mengakses produk-produk UMKM, sehingga menurunkan omzet penjualan UMKM. Akibatnya sekitar 44% UMKM terpaksa melakukan lay-off atau menekan jumlah tenaga kerja, dengan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi itu mengaskan bahwa UMKM menjadi pihak yang terdampak, dengan sebagian besar dari mereka mengharapkan dukungan informasi atau media pemasaran. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya dukungan kebijakan dalam rangka mendukung pembelian produk-produk UMKM.

Mencermati hal itu, Pemerintah Daerah menilai upaya pemulihan ekonomi menjadi langkah yang dilakukan seiring dengan menekan penyebaran pandemi Covid-19, dengan sejumlah tahapan dan prioritas. Salah satunya, dengan memberikan rangsangan masyarakat untuk membeli produk-produk UMKM, sebagaimana SE Gubernur DIY Nomor 519/7669 tentang himbauan untuk pembelian produk-produk UMKM. Peran koperasi dalam situasi serba sulit sekarang ini amatlah vital. Koperasi yang di gadang-gadang sebagai soko guru perekonomian haruslah mengambil peran strategis untuk bisa membangkitkan sector ekonomi yang terpuuk. Terkait data-data terkait koperasi tersaji seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.13. Keragaan Koperasi DIY

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Koperasi	23800	19890	19180	19380	Unit
1,1	Koperasi Aktif	1.782	1.926	1.722	1.758	Unit
1,2	Koperasi Pasif	598	63	196	180	Unit
2	Jumlah Anggota Koperasi	946499	1016126	753061	707883	Orang
2,1	Laki -laki	508.966	558.917	409.259	404.498	Orang
2,2	Perempuan	437.533	457.209	343.802	303.385	Orang
3	Kope rasi yang melaksanakan RAT	1.307	1.436	1.323	1.106	Unit
4	Jumlah Pengurus Koperasi	7336	5967	5688	5720	Orang
4,1	Laki -laki	4.794	3.703	3.352	3.362	Orang
4,2	Perempuan	2.542	2.264	2.336	2.358	Orang
5	Jumlah Pengawas	8848	6039	5569	5585	Orang
5,1	Laki -laki	4.792	4.028	3.630	3.640	Orang
5,2	Perempuan	4.056	2.011	1.939	1.945	Orang
6	Jumlah Dewan Syariah	997	676	636*	642	Orang
6,1	Laki -laki	997	676	636	642	Orang
7	Jumlah Manajer Koperasi	603	588	469	563	Orang
7,1	Laki -laki	454	446	356	423	Orang
7,2	Perempuan	149	142	113	140	Orang
8	Jumlah Karyawan Koperasi	7412	7853	3884	6134	Orang
8,1	Laki -laki	4.418	4.591	2.120	3.507	Orang
8,2	Perempuan	2.994	3.262	1.764	2.627	Oran g
9	Modal sendiri	1.200.158	1.425.918	1.625.568	1.595.511	Rp. Juta
10	Modal Luar	2.085.166	2.262.263	2.512.343	2.188.554	Rp. Juta
11	Volume Usaha Koperasi	3.679.342	4.394.362	4.325.218	4.142.871	Rp. Juta
12	Selisih Hasi Usaha	127.564	233.164	170.808	137.738	Rp. Juta
13	Aset Koperasi	4.159.073	5.302.476	4.562.978	4.422.833	Rp. Juta
14	Jumlah KUD	64	64	64	64	Unit
15	Jumlah non KUD	2.316	1.925	1.854	1.874	Unit

Sumber : Jogja Dataku, 2020

Sedangkan data elemen terkait bentuk koperasi dan jumlah anggotanya di aplikasi Dataku tersaji seperti di bawah ini:

Tabel 5.14 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota di DIY

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2017	2018	2019	2020	
1	Koperasi Primer	2.352	1.963	1.890	1.908	Unit
2	Koperasi Skunder	28	26	28	30	Unit

Sumber : Jogja Dataku, 2020

D. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pandemi Covid-19 hari ini yang terjadi hampir di seluruh wilayah dunia menyebabkan guncangan yang luar biasa di berbagai sektor. Negara-negara di seluruh duniapun terkonsentrasi untuk penanganan pandemi dan krisis multisektor yang di timbulkan akibat situasi tersebut. Akan tetapi Covid-19 bukan satu- satunya penyebab terjadinya krisis, jauh sebelum situasi Covid-19 ini dunia telah mengalami krisis yang akut dan berkepanjangan. Di Indonesia sendiri dalam situasi yang kurang menggembirakan dikarenakan respon pemerintah yang terkesan lambat dan kurang efektif terhadap penanganan virus ini. Kelas buruh dan rakyat pekerja rendah lainnya di Indonesia adalah yang paling merasakan dampak langsung dan paling menderita dari situasi Covid-19 ini karena terancam keselamatannya di tempat kerja dan resiko kehilangan pekerjaan yang tinggi. Permasalahan Ketenagakerjaan di DIY saat ini: (1) Tingginya jumlah

penganggur terbuka menyebabkan Tahun 2020 Capaian IKU Gubernur hanya mencapai angka 52,95% (2) Rendahnya tingkat produktivitas pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (3) Perubahan cepat pola kerja akibat revolusi industri 4.0 dan adaptasi pandemic (4) Angkatan kerja bergeser ke Bukan Angkatan Kerja khususnya Pengurus Rumah Tangga (5) Tingginya Kasus Hubungan Industrial

Pasca vaksinasi diharapkan geliat ekonomi akan kembali pulih secara perlahan-lahan seiring pula dengan berbagai stimulus kebijakan dan skema bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah guna mengatasi dampak pandemi semaksimal mungkin. Data-data terkait kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Sakernas BPS Agustus 2020 tersaji seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.15. Kondisi Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian	Semula	Menjadi	Keterangan
Penduduk Usia Kerja	3.132.754	3.176.679	Naik 43.925 orang
- Angkatan Kerja	2.228.162	2.210.130	Turun 18.032 orang
- Bukan Angkatan Kerja	904.592	966.549	Naik 61.957 orang 22.825 Dampak Covid - 19
Angkatan Kerja			
- Bekerja	2.126.316	2.077.920	Turun 48.396 orang
- Pengangguran	101.846	132.210	Naik 30.364
Bekerja			
- Pekerjaan Penuh	1.353.932	1.200.716	Turun 153.216
- Pekerjaan Paruh Waktu	601.472	620.983	Naik 19.511
- Setengah Menganggur	170.912	256.221	Naik 85.309

Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Strategi Ketenagakerjaan Menghadapi Pandemi

Berdasar data-data tersebut langkah dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam mengantisipasi permasalahan ketenagakerjaan akibat dampak pandemi Covid-19 diuraikan sebagai berikut:

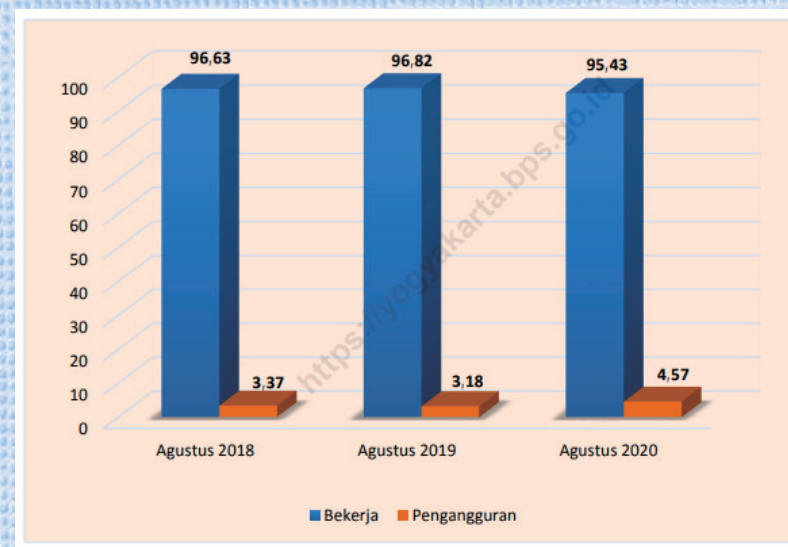
1. Penganggur dan Setengah penganggur (Angk. Kerja Baru maupun akibat terdampak Pandemi Covid-19) (272.758 Orang): Melakukan Pelatihan Ketrampilan (Upskilling, Reskilling), Pemagangan dan sertifikasi; Mengefektifkan perantaraan kerja untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja; Melakukan pembentukan kewirausahaan dan Pemberian kerja cepat (Padat Karya). Program yang di rancang: Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Progam Penempatan Tenaga Kerja

2. Penduduk Bekerja (4.945 Perusahaan 140.666 Tenaga Kerja): Peningkatan layanan bidang hubungan industrial; Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3 dan Pelayanan K3 (Pemeriksaan Kesehatan kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja. Program yang di rancang: Program Hubungan Industrial Serta Progam Pengawasan Ketenagakerjaan

3. Penduduk : Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di daerah terpencil di Indonesia Program yang di rancang: Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Angkatan Kerja

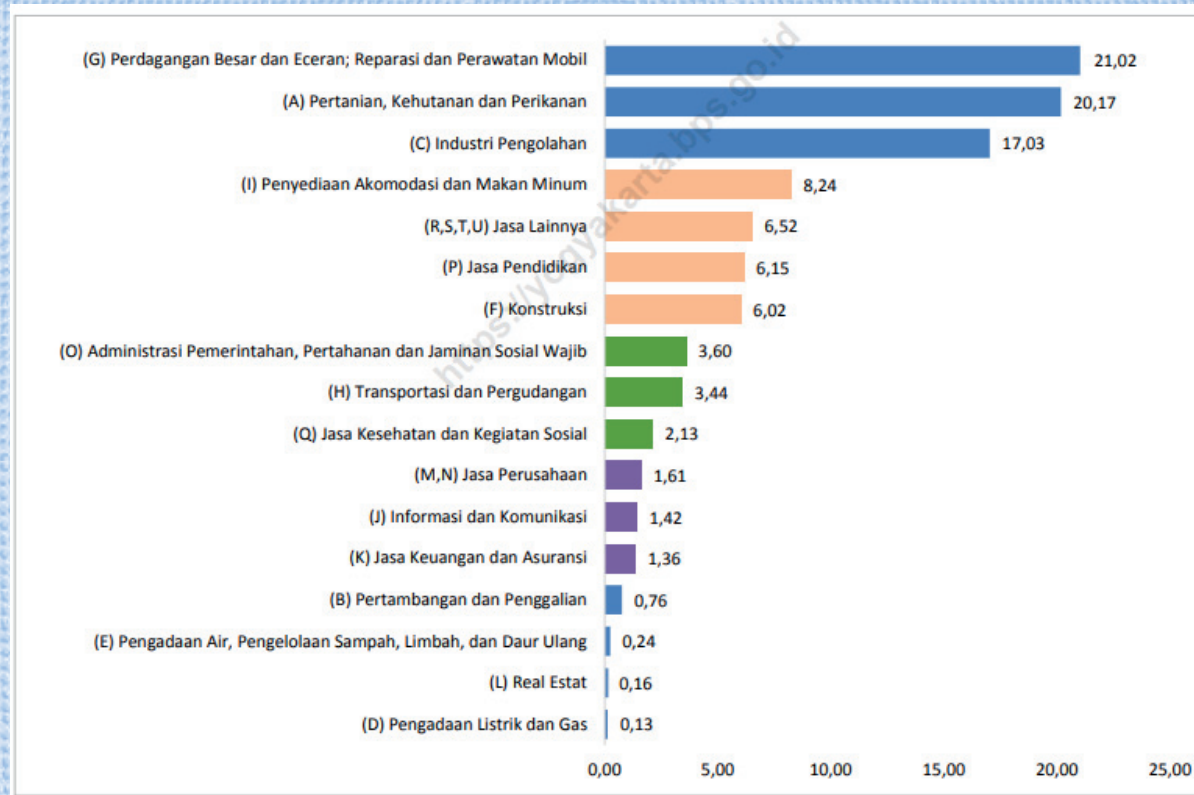
Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu fokus penanganan dampak Pandemi Covid-19 oleh pemerintah. Upaya terus menerus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, seperti upaya perlindungan hak pekerja, bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak (PHK), insentif bagi pengusaha agar tetap dapat menjalankan roda bisnisnya, hingga berbagai pelatihan keterampilan yang diharapkan mampu menjadi solusi para pekerja terdampak (PHK) untuk dapat berwirausaha dan lain lain. Terkait dengan angkatan kerja, data persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan Sakernas BPS Agustus 2020 tersaji dalam grafik di bawah ini:



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja

Selain itu tersaji pula data terkait Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama hasil dari pendataan Sakernas BPS Agustus 2020 yang tersaji dalam grafik di bawah ini:



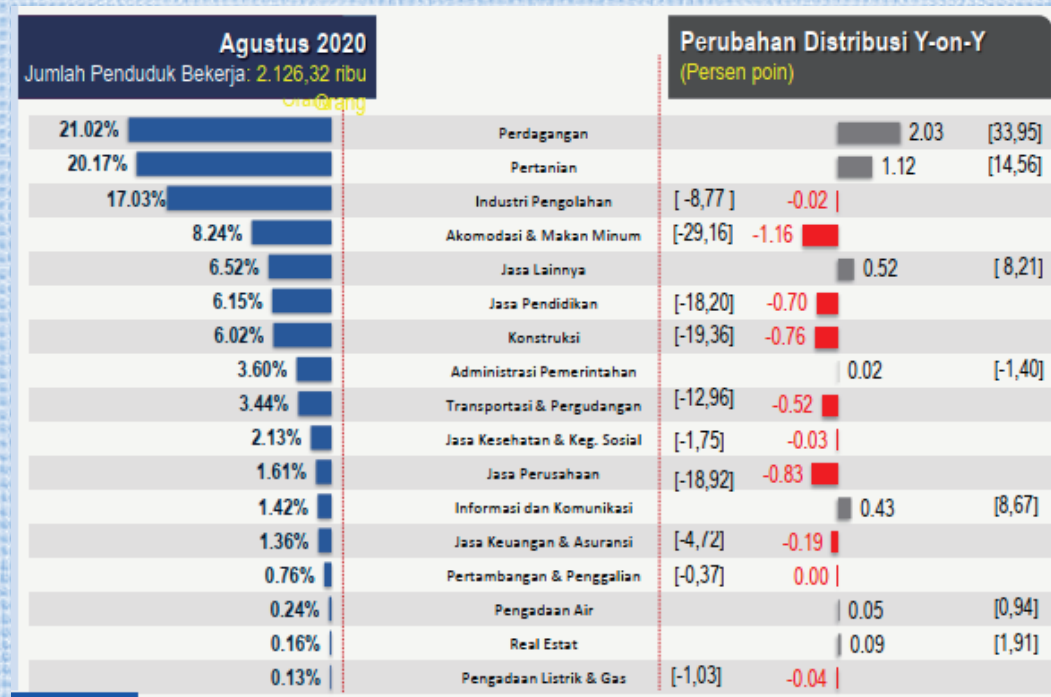
Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-2. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Berdasar data Sakernas BPS Agustus 2020 dalam masa pandemi saat ini ternyata struktur ketenagakerjaan sedikit berubah. Perdagangan menjadi pilihan utama buruh/karyawan yang terdampak pandemi sehingga pertumbuhan tenaga kerjanya tertinggi. Fenomena tumbunya wirausaha baru yang mencoba peruntungannya dengan berdagang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Selain itu sector pertanian merupakan sektor yang relative kurang terdampak adanya pandemi, namun justru bisa mencatatkan pertumbuhan baik dari sisi nilai

perdagangan maupun ketenagakerjaan. Karena musim yang baik serta kebutuhan akan pangan yang tetap tinggi di masa pandemi sehingga sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja tertinggi setelah perdagangan.

Jasa kesehatan yang PDRB sangat tinggi tetapi tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan tenaga kerja begitu juga dengan jasa pendidikan yang justru tenaga kerjanya berkurang. Baik PDRB maupun tenaga kerja sektor konstruksi dan sektor pendukung pariwisata sangat terpukul akibat pandemi.



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-3. Penduduk Bekerja Struktur Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019-2020

Struktur Lapangan Kerja

Selain data terkait struktur lapangan pekerjaan, terdapat pula data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dalam Sakernas BPS Agustus 2020 sehingga dapat terlihat status jenis kegiatan

apakah bekerja, pengangguran terbuka bagi angkatan kerja dan sekolah, mengurus rumah tangga atau yang lainnya bagi yang bukan angkatan kerja. Datanya seperti tersaji dalam gambar berikut ini:

Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		Laki-laki+Perempuan/Male+Female		
Jenis Kegiatan Type of Activity	Tahun / Years	Tahun / Years		
		2018 *)	2019 *)	2020
		Agustus August	Agustus August	Agustus August
(1)		(2)	(3)	(4)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Population 15 Years of Age and Over		3 044 586	3 088 829	3 132 754
Angkatan Kerja/Economically Active		2 226 284	2 246 194	2 228 162
Bekerja/Working		2 151 252	2 174 712	2 126 316
Pengangguran Terbuka/Unemployment		75 032	71 482	101 846
Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active		818 302	842 635	904 592
Sekolah/Attending School		259 491	278 350	277 808
Mengurus Rumah tangga/House Keeping		461 036	463 355	526 850
Lainnya/Others		97 775	100 930	99 934
T P A K (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Labor Force Participation Rate (%)		73.12	72.72	71.12
T P T (Tingkat Pengangguran Terbuka) Unemployment Rate(%)		3.37	3.18	4.57
Pekerja Tidak Penuh Less than Normal Working Hours		615 060	667 564	772 384
Setengah Penganggur/Underemployment		91 533	85 603	170 912
Paruh Waktu/Part-time Worker		523 527	581 961	601 472

Catatan/Note:
*) Perbaikan Penimbang Berdasarkan Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020
Gambar 5-4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

Dalam gambar berikut tersaji data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Data tersebut

sekaligus dapat memberikan gambaran jumlah pencari kerja per Kabupaten/Kota sehingga dapat di gunakan dalam merumuskan strategi pembangunan dalam upaya penyediaan lapangan kerja, sekaligus inventarisir kebutuhan tenaga kerja dalam mendorong investasi yang membutuhkan tenaga kerja.

Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural				Laki-laki+Perempuan/Male+Female					
Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Tahun / Years								
	2018 *)			2019 *)			2020		
	Agustus/August			Agustus/August			Agustus/August		
	Bekerja Working	Pengangguran Terbuka Unemployment	TPT (%)	Bekerja Working	Pengangguran Terbuka Unemployment	TPT (%)	Bekerja Working	Pengangguran Terbuka Unemployment	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kulon Progo	253 156	3 873	1.51	256 506	4 710	1.80	259 421	10 005	3.71
Bantul	569 962	16 188	2.76	571 495	18 080	3.07	585 160	24 783	4.06
Gunungkidul	444 779	9 606	2.11	448 567	8 972	1.96	389 444	8 591	2.16
Sleman	657 003	30 294	4.41	663 506	27 508	3.98	667 823	35 843	5.09
Kota Yogyakarta	226 352	15 071	6.24	234 638	12 212	4.95	224 468	22 624	9.16
Jumlah/Total	2 151 252	75 032	3.37	2 174 712	71 482	3.18	2 126 316	101 846	4.57

Catatan/Note:

*) Perbaikan Penimbang Berdasarkan Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020
Gambar 5-5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		Laki-laki+Perempuan/Male+Female		
Lapangan Pekerjaan Utama Main Industry *)	Tahun / Years			
	2018 **)	2019 **)	2020	
	Agustus August	Agustus August	Agustus August	
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	439 891	414 413	428 974	
B	19 007	16 479	16 105	
C	351 142	370 823	362 058	
D	6 109	3 853	2 822	
E	5 288	4 176	5 117	
F	162 612	147 271	127 908	
G	400 523	412 955	446 907	
H	77 533	86 084	73 120	
I	211 375	204 427	175 270	

Catatan/Note :

- ^{*)} A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
C. Industri Pengolahan/Manufacturing D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas
E. Pengadaan Air; Pengelolaan sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities
F. Konstruksi/Construction
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities

^{**)} Perbaikan Penimbang Berdasarkan Proyeksi Penduduk SUPAS2015

Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020
Gambar 5-6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		Laki-laki+Perempuan/Male+Female		
Lapangan Pekerjaan Utama Main Industry ^{*)}	Tahun / Years			
	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}	2020	
	Agustus August	Agustus August	Agustus August	
(1)	(2)	(3)	(4)	
J	16 286	21 623	30 291	
K	34 573	33 621	28 906	
L	1 964	1 506	3 418	
M,N	51 008	53 133	34 209	
O	76 085	78 004	76 603	
P	118 798	148 993	130 798	
Q	35 749	46 994	45 240	
R,S,T,U	143 309	130 357	138 570	
Jumlah/Total	2 151 252	2 174 712	2 126 316	

Catatan/Note:

- ^{*)} J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities
L. Real Estat/Real Estate Activities
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
P. Jasa Pendidikan/Education
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
R,S,T,U. Jasa lainnya/Other Services Activities
^{**) Perbaikan Penimbang Berdasarkan Proyeksi Penduduk SUPAS2015}

Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020
Gambar 5-6. (Lanjutan) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Selanjutnya dalam Sakernas BPS Agustus 2020 terdapat pula data Rata-rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Selama Sebulan Buruh/ Karyawan Menurut Kabupaten/Kota seperti tersaji dalam gambar di bawah ini. Data tersebut

dapat diperoleh gambaran tingkat pendapatan dan kesejahteraan dari para pekerja.

Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural		Laki-laki+Perempuan/Male+Female	
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tahun / Years		
	2018 *)	2019 *)	2020
	Agustus August	Agustus August	Agustus August
	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan Average of Net Wage/Salary Employee/Laborer	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan Average of Net Wage/Salary Employee/Laborer	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan Average of Net Wage/Salary Employee/Laborer
	(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	2 085 957	2 251 571	2 169 284
Bantul	2 179 986	2 142 792	2 196 731
Gunungkidul	1 836 480	1 816 012	1 814 919
Sleman	2 128 704	2 632 130	2 595 048
Kota Yogyakarta	2 210 543	2 317 449	2 267 519
Jumlah/Total	2 112 551	2 307 500	2 308 710

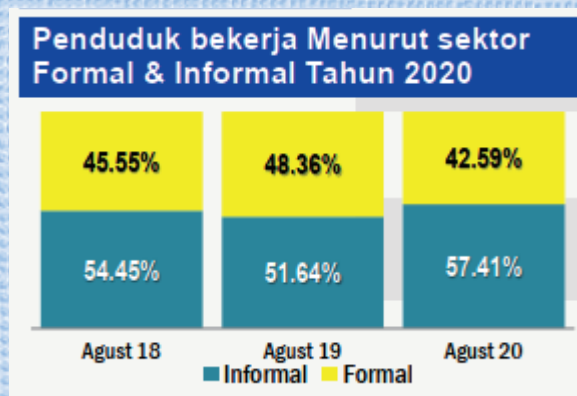
Catatan/Note:

*) Perbaikan Penimbang Berdasarkan Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-7. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Selama Sebulan Buruh/ Karyawan Menurut Kabupaten/Kota

Data dalam Sakernas BPS Agustus 2020 juga menampilkan data-data Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Tahun 2020. Data yang tersaji di bawah menunjukkan sektor informal mendominasi pekerjaan di DIY. perkembangan sektor informal dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, perkembangan ekonomi digital dan teknologi memacu tumbuhnya wiraswasta secara online dan mandiri. Selain itu, pertumbuhan sektor informal juga dipengaruhi dari karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja fleksibel. Sisi lainnya, pertumbuhan pekerja informal juga dapat disebabkan alternatif terakhir untuk sekadar mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pembangunan yang tidak merata juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor informal.



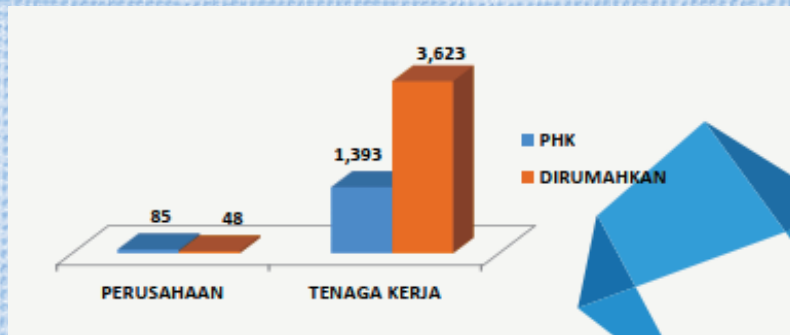
Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-8. Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Tahun 2020

Banyak Buruh/karyawan terdampak pandemi (PHK) banyak yang beralih ke wirausaha, membantu usaha keluarga serta bekerja pada sector non pertanian dengan jam kerja yang lebih sedikit. Sehingga setengah penganggur dan sektor informal semakin tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka

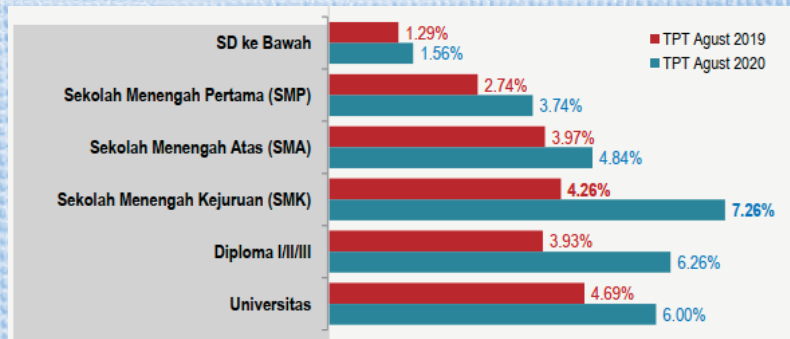
Pandemi virus corona (Covid-19) menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi bertumbuh minus 5,32%. Tentu saja hal ini sangat memberatkan bagi sebagian perusahaan. Dampak pelemahan ekonomi berdampak pada pengurangan volume produksi, terhambatnya proses produksi, terganggunya system distribusi dan tentunya pelemahan daya beli sehingga produk tidak terserap pasar. Hal tersebut tentu saja akan berimbas pula pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data yang dirilis oleh kemenaker per 20 April 2020 angka korban PHK dan dirumahkan akibat pandemi ini mencapai 2 juta orang dari sector formal maupun informal di seluruh Indonesia. Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sampai hari ini buruh yang terdampak langsung akibat pandemi ini mencapai angka 36.962 orang, dimana ada 1.710 orang yang di-PHK dan 35.252 orang dirumahkan. Dimana 30.282 orang diantaranya berdomisili DIY sedangkan KTP Non DIY berjumlah 6.677 orang. Tentu angka ini sangat mengejutkan dan sekaligus menunjukkan betapa besarnya penderitaan rakyat yang harus ditanggung, utamanya berkaitan dengan jaminan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar puluhan ribu rakyat pekerja di DIY yang terdampak PHK ataupun dirumahkan yang berimbas pada hilangnya sumber pendapatan ekonomi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat.



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-9. Jumlah PHK dan Dirumahkan Tahun 2020

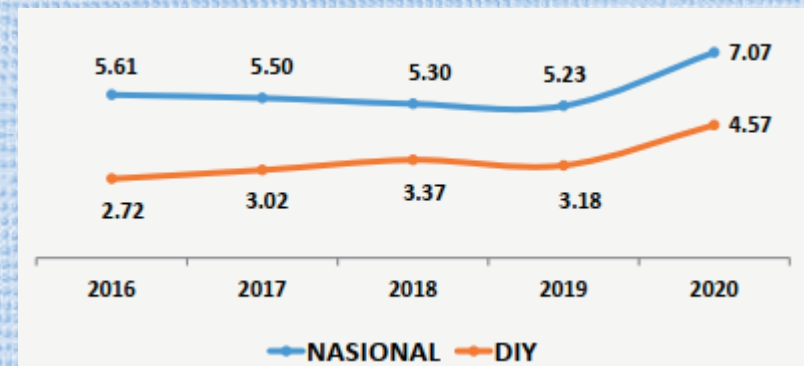
Tentu saja hal tersebut akan berimbas pada perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Definisi TPT Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang akan mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

Gambar 5-10. TPT Menurut Pendidikan DIY Agustus 2019 dan 2020

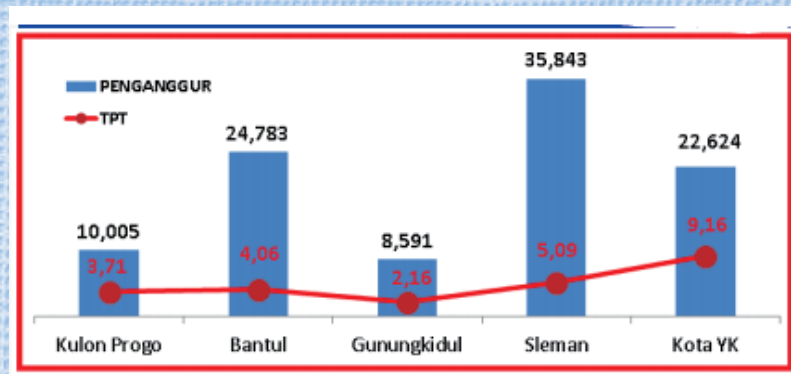
Dalam membahas masalah ketenagakerjaan sangat penting membahas Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan salah satu indicator dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pada data Sakernas BPS Agustus 2020 TPT di DIY tertinggi pada jenjang SMK: 7,26%, dengan jumlah penganggur 35 ribu atau 34%, disebabkan karena jumlah lulusan SMK paling tinggi sementara penyerapan pencari kerja baru tertahan oleh pandemi.



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020

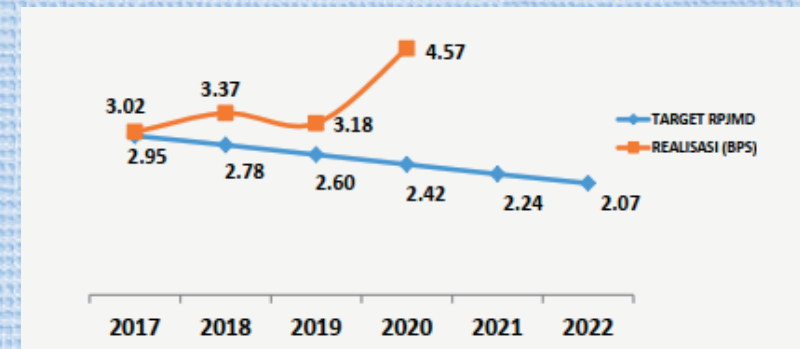
Gambar 5-11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional

Tingkat penganggur terbuka masih dibawah rata-rata nasional, tetapi terjadi penurunan peringkat menjadi peringkat ke 8 dari peringkat ke 2 pada tahun 2019.



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020
Gambar 5-12. TPT dan Jumlah Penganggur Kab/Kota

Kota Yogyakarta dengan TPT tertinggi 9,16%, tetapi jumlah terbesar ada di kab. Sleman 35,8 ribu (35 %)



Sumber : Sakernas, BPS Agustus 2020
Gambar 5-13. Target dan Capaian RPJMD (Tingkat Pengangguran Terbuka)

BAB IV INFOGRAFIS

A. Pengentasan Kemiskinan

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kondisi ekonomi merata di seluruh wilayah. Tentu saja hal tersebut secara langsung berdampak pada tingkat kemiskinan dan upaya upaya pengentasan kemiskinan. Berikut ini di sampaikan uraian Analisis Kemiskinan di DIY tahun 2020 sebagai narasi infografis yang tersedia di aplikasi Dataku. Pengelompokan penduduk menurut pengeluaran perkapita menunjukkan rasio pengeluaran kelompok 20% tertinggi terhadap 20% terendah pada periode 2018-2019 di Seluruh Kabupaten/kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tertinggi terjadi di Kota



Yogyakarta dari 9,35 pada tahun 2018 menjadi 6,72 pada tahun 2019, sementara itu Kabupaten Kulonprogo tidak mengalami penurunan. Angka Growth Incidence Curve (GIC) DIY selama periode tahun 2017-2018 menunjukkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita (r_{expcap}) kelompok 20% terbawah jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas, serta berada di bawah rata-rata pertumbuhan Garis Kemiskinan (r_{GK}).

Rumah tangga miskin di DI Yogyakarta cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota rumah tangga sekitar 4-5 orang (4,86 orang).

Berdasarkan distribusi umur, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 56,47 tahun atau lebih tua dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang mencapai 47,87 tahun. Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika dilihat perbandingan rata-rata umur kepala rumah tangga miskin, Kabupaten Sleman memiliki rata-rata umur perempuan sebagai kepala rumah tangga tertua, yaitu mencapai 59,98 tahun dan Kota Yogyakarta dengan rata-rata umur termuda (53,16 tahun).

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk miskin di DI Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SLTP ke bawah sebesar 73,04%. Rumah tangga miskin lebih banyak dijumpai pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan rendah.

Penduduk miskin yang tinggal Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman pada periode

tahun 2019 ternyata paling banyak rawat inap di RS Pemerintah. Sementara 2 kab lainnya banyak menggunakan RS Swasta. Informasi ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses fasilitas kesehatan turut menjadi pertimbangan pilihan penggunaan tempat rawat inap.

Jumlah penduduk miskin secara absolut lebih banyak berada di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan, namun untuk persentase penduduk miskin (P0) kondisinya menunjukkan perbedaan. Persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan.

Tingkat penurunan penduduk miskin terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta selama setahun terakhir berada di Kota Yogyakarta yang mencapai sekitar 300-an jiwa. Upaya pengurangan penduduk miskin secara absolut di Kota Yogyakarta membutuhkan sumberdaya yang besar karena diduga jumlah penduduk miskin yang ada sudah pada level *hardcore poverty*.

Kulon Progo tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di DIY, namun kabupaten ini juga mencatatkan pretasi yang cukup baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Selama periode 2018 - 2019, terjadi pengurangan nilai P0 sebesar 0,81 poin persen. Pengurangan nilai P0 ini merupakan yang tertinggi di wilayah DIY pada periode tersebut. Kabupaten lain yang juga mencatatkan laju pengurangan P0 cukup tinggi di DIY.

Rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta terbanyak masuk dalam kategori tahan pangan antara 48% hingga 79%.

Sementara itu rumah tangga Kabupaten Gunungkidul didominasi rumah tangga kategori rentan Pangan. Kategori rumah tangga rawan pangan masih juga ditemukan di semua kabupaten/kota. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul menjadi 2 kabupaten dengan persentase rumah tangga rawan pangan tertinggi, masing-masing sebesar 8,66% dan 7,13%.

Pola pangan harapan (PPH) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sebesar 93,90. Artinya pola pangan tahun 2019 belum mencapai ideal yakni 100. Skor PPH di perkotaan (93,48) lebih tinggi daripada di perdesaan (91,94). Hal ini menunjukkan mutu keragaman konsumsi pangan di perkotaan lebih beragam daripada di perdesaan. Disamping itu juga skor PPH juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya level kelompok pengeluaran (desil).

Tingkat konsumsi energi di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 110%. Tingkat konsumsi energi kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Sleman (119,15%), diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul (108,21%), Kota Yogyakarta (107,03%), Kabupaten Bantul (105,25%) dan yang terkecil adalah Kabupaten Kulonprogo (101,69%).

Perlambatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akibat melambatnya investasi bangunan sebagai komponen dominan, yaitu turun 2,13 poin persen. Sebaliknya investasi non bangunan pada tahun 2019 tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan 2018. Pertumbuhan investasi DIY tentunya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Indonesia yang dilakukan BPS pada Bulan Juli 2020 diperoleh informasi bahwa perusahaan berhenti beroperasi (8,76%), pemberlakuan Work From Home (7,5%), beroperasi dengan pengurangan kapasitas (24,31%), beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19 (0,49%) dan sisanya masih beroperasi seperti biasa (58,95%).

Secara umum terlihat bahwa sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal. Di kabupaten Gunungkidul jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor informal bahkan mencapai lebih dari setengahnya (55,86%). Selain itu pula, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman juga tercatat relatif tinggi, yang jumlahnya mencapai 49% dan 48%. Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh kabupaten Bantul.

Persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta yang tidak bekerja sebesar 32,83% dan yang bekerja di sektor informal sebesar 44,97% serta bekerja di sektor formal sebesar 22,20%.

Lapangan usaha penduduk miskin yang bekerja cukup bervariasi antara kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kabupaten Gunungkidul, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (48,86%), Sementara itu penduduk miskin di Kulon Progo, Bantul, dan Sleman menjadikan lapangan usaha di luar pertanian sebagai pekerjaan utamanya dengan besaran masing-masing 45,49%, 45,55%, dan 41,56%. Sementara

itu, penduduk miskin Kota Yogyakarta bekerja luar sektor pertanian (64,05 %) dan yang tidak bekerja (35,95%).

Penerima program BPNT mulai dari Desil 1 hingga Desil 10 menunjukkan persentase yang semakin kecil. Semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita maka semakin sedikit persentase rumah tangga penerima program BPNT. Hal ini berarti persebaran rumah tangga penerima BPNT didominasi oleh kelompok pendapatan bawah (Desil 1-Desil 4).

Berdasarkan distribusi rumah tangga penerima PKH, semakin tinggi kelompok pengeluaran perkapita maka persentase rumah tangga penerima PKH juga semakin kecil. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran Desil 1 memiliki persentase penerima PKH paling tinggi meskipun kurang dari 50%, yaitu sebesar 44,95%, sedangkan 55,05% pada Desil 1 tidak menerima PKH.

Penerima bantuan kredit pada tahun 2019 lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu (desil atas) yaitu kelompok pengeluaran Desil 10 yang mencapai 14,28% dari seluruh rumah tangga penerima kredit dan rumah tangga dengan desil 1 (termiskin) menerima bantuan kredit paling sedikit (5,01%). Hal ini diduga karena rumah tangga miskin memiliki tingkat kemampuan pengembalian kredit yang lebih rendah (kurang blankable) dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Jika dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga kelompok Desil 1 di kota yang menerima bantuan kredit hanya sebanyak 3,24% dan di desa jauh lebih banyak, yaitu mencapai 9,06 % dari seluruh rumah tangga penerima bantuan kredit.

B. Penanganan Ketimpangan

Sejalan dengan kondisi di atas, yaitu terpengaruhnya tingkat kemiskinan akibat dari pandemi Covid-19, terdapat pula pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah DIY. Hal tersebut tentu saja imbas dari pandemi Covid-19 yang akhirnya memukul sektor ekonomi. Berikut ini di sampaikan hasil Analisis Ketimpangan di DIY tahun 2020 sebagai narasi infografis yang tersaji dari aplikasi Dataku.

Pada tahun 2015 penduduk dengan 20% penghasilan terendah menerima pendapatan sekitar 6,20%. Angka ini cenderung menurun selama 3 tahun berikutnya. Sementara persentase yang diterima kelompok penduduk terkaya (kuantil 5) berfluktuatif dengan cenderung menurun. Bila pada tahun 2015, kelompok penduduk ini masih menikmati 50,26%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 48,88%. <http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/publikasi/detail/30-analisis-ketimpangan-pendapatan-diy-2020> Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan pada kuantil 1-3 lebih besar daripada kelompok bukan makanan. Sebaliknya, pada kelompok kuantil 4 dan 5 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan lebih kecil daripada kelompok bukan makanan. Pengeluaran perkapita untuk kelompok bukan makanan terlihat sekali kesenjangannya, pada kuantil 1 di perkotaan dengan rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebesar 155.456 rupiah sedangkan pada kuantil 5 sebesar 2.231.437 rupiah. Sama halnya di daerah perdesaan untuk kuantil 1 rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebesar 128.171 rupiah



dan kuantil 5 sebesar 2.231.437 rupiah.

Hasil penghitungan angka Gini Rasio tahun 2015-2019 menunjukkan adanya fluktuasi ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tren yang menurun. Pada tahun 2015, angka Gini Rasio tercatat sebesar 0,433. Pada tahun 2017 Gini Rasio turun menjadi 0,432, dan pada tahun 2019 Gini Rasio Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 0,423. Ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia, terlihat juga adanya ketimpangan yang menurun pada periode 2015-2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu terlihat pula kecenderungan semakin meningkatnya persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah. Pada tahun 2015, Indeks Palma di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,345. Hal tersebut berarti bahwa pangsa pengeluaran untuk 10% penduduk terkaya adalah sebesar 2,345 kali lebih tinggi daripada konsumsi yang dilakukan oleh 40% penduduk terbawah. Disamping itu juga terjadi penurunan disparitas antara pengeluaran 10 % penduduk terkaya dengan pengeluaran 40% penduduk terbawah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pengukuran tingkat ketimpangan dengan menggunakan angka gini rasio ukuran Bank Dunia maupun Indeks Palma, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tingkat ketimpangan yang tinggi di wilayah perkotaan tersebut nampaknya merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat ketimpangan di Daerah Istimewa

Yogyakarta secara keseluruhan.

Pada periode 2017-2019, ada 3 kabupaten/kota dengan Gini Rasio terus mengalami penurunan. Ketiga Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman cukup fluktuatif, walaupun pada tahun 2019 juga menurun dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan kabupaten dengan tingkat kesenjangan dalam kategori rendah, sedangkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2019 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Kabupaten Bantul pada tahun 2019 memiliki tingkat kesenjangan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Pengukuran dengan tiga indikator kesenjangan yang dipergunakan, terlihat bahwa untuk daerah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris (Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul) tingkat kesenjangan relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak non-agraris (Sleman dan Kota Yogyakarta).

Dari hasil Susenas 2019, terlihat bahwa tingkat pendidikan kelompok pengeluaran terendah jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk kelompok pengeluaran tertinggi. Lebih dari separuh penduduk dari kelompok pengeluaran terendah hanya

mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah. Sementara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh separuh penduduk kelompok pengeluaran tertinggi adalah SLTA ke atas. Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk dari kelompok pengeluaran terendah bekerja pada sektor pertanian. Sementara itu, pada saat yang sama sebagian besar penduduk dari kelompok pengeluaran tertinggi bekerja pada sektor Jasa.

Terdapat tiga indikator yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu besarnya investasi pada tingkat kabupaten/kota, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan produktivitas tenaga kerja.

Covid-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Sakernas Agustus 2020 dapat dijelaskan bahwa penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan pengurangan jam kerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai 88,09% dan sisanya 11,91% tidak terkait Covid-19. Penduduk 15 tahun ke atas yang berhenti bekerja mulai Maret 2020 terkait Covid-19 mencapai 68,45% dan sisanya 31,55% tidak terkait dengan Covid-19. Selanjutnya penduduk yang memilih status sementara tidak bekerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai lebih dari separuh (54,68%) dan sisanya sebanyak 45,32% dengan alasan tidak terkait Covid-19 (cuti, sakit, aturan waktu kerja, cuaca, dll). Jika kondisi ketenagakerjaan ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan pekerja dengan kelompok pendapatan terbawah lebih tajam dibandingkan pelaku

usaha yang relatif dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Pola searah yang cenderung menurun pada persentase penduduk miskin, indeks Gini, dan indeks Palma pada periode 2015-2019. Pada tahun 2016, ketika persentase penduduk miskin turun dari 14,91% menjadi 13,34% terlihat bahwa indeks Palma dan indeks Gini juga mengalami penurunan, masing-masing secara berurutan dari 2,345 dan 0,433 menjadi 2,047 dan 0,420.

Nilai pengeluaran konsumsi makanan bagi kelompok penduduk miskin dan penduduk tidak miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 terdapat perbedaan yang cukup besar dalam semua jenis konsumsi makanan. Perbedaan pengeluaran yang terbesar secara rata-rata untuk kelompok tidak miskin dibandingkan kelompok miskin adalah makanan hewani (ikan, daging, telur dan susu). Secara proporsional pengeluaran konsumsi makanan pada kelompok penduduk miskin lebih mengumpul pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian yang mencapai sekitar 44 %. Perbedaan nilai pengeluaran juga terjadi pada setiap kelompok pengeluaran bukan makanan yang ada.

